

MANDALA DATA



(MANTAPAN NAGARI
DATA LANGSUNG TERINTEGRASI)

LIZDA HANDAYANI, M.KOM

Kepala Bidang Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Prov. Sumatera Barat



VASKO RUSEIMY S.T DR. HERITA DEWI, M.M

STRATEGI PENGEMBANGAN SATU DATA SUMATERA BARAT

MELALUI INTEGRASI DATA NAGARI DALAM
MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL
MENDUKUNG VISI INDONESIA MAJU
2045



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025161596, 23 Oktober 2025

Pencipta

Nama : **LIZDA HANDAYANI, M.Kom**

Alamat : Jalan Gurun Lawas Nomor 6, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, 25222

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LIZDA HANDAYANI, M.Kom**

Alamat : Jalan Gurun Lawas Nomor 6, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, 25222

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis**

Judul Ciptaan : **Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 September 2025, di Kota Padang

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor Pencatatan : 001001856

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN KEPEMIMPINAN STRATEGIS

**Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi
Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi
Indonesia Maju 2045**

**Mandala Data
(Mantapkan Nagari Data Langsung Terintegrasi)**

Disusun oleh :

LIZDA HANDAYANI, M.Kom
NIP. 19750121 200212 2 001

COACH:

Dr. HERITA DEWI, MM.
NIP. 19690427 200501 2 004

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XX TAHUN 2025**

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**



LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN IMPELEMENTASI PROYEK PERUBAHAN KEPEMIMPINAN
STRATEGIS PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XX
KERJA SAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

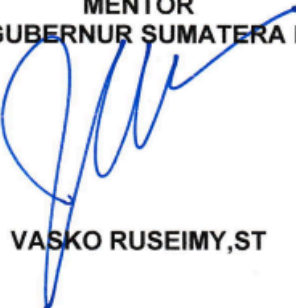
JUDUL : AKSELERASI KELEMBAGAAN DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT NAGARI MELALUI KOLABORATIF (AKURASI) DALAM MENDORONG PEMBENTUKAN NAGARI *CREATIVE HUB* DI SUMATERA BARAT

DISUSUN OLEH :
NAMA : VERA IRAWATI,ST.MM
NIP : 19800918200604 2 006
NDH : 028

DIPAPARKAN DI BPSDM PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA SEMINAR LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

OKTOBER 2025

MENTOR
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

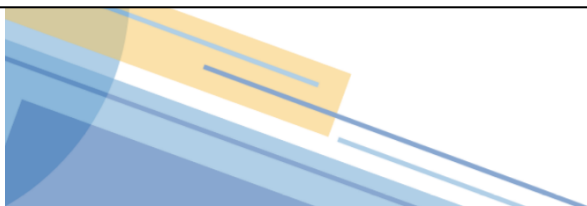


VASKO RUSEIMY,ST

COACH
WIDYASWARA AHLI MADYA



Dr.HERITA DEWI,M.M
Nip.196904272005012004





KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vasko Ruseimy,ST
Nip : -
Jabatan : Wakil Gubernur Sumatera Barat

Nama : Vera Irawati,ST.MM
Nip : 19800918 200604 2 006
Jabatan : Kepala Bidang Kerjasama dan Pembangunan
Kawasan Perdesaan

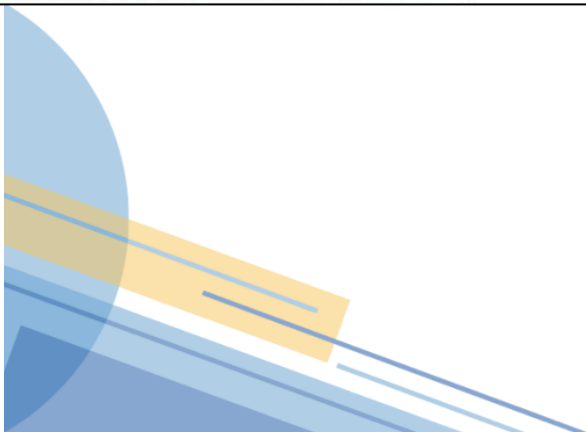
Berkomitmen terus melanjutkan Proyek Perubahan dengan tema “Akselerasi Kelembagaan Dan Usaha Ekonomi Masyarakat Nagari Melalui Kolaboratif (AKURASI) dalam Mendorong Pembentukan Nagari *Creative Hub* di Sumatera Barat” Sesuai dengan tahapan yang telah di tetapkan.

MENTOR

VASKO RUSEIMY,ST

PESERTA

VERA IRAWATI,ST.MM
Nip.19800918 200604 2 006



KATA *Pengantar*

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, rancangan dan Implementasi "Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045 - Mandala Data, Mantap Nagari Data Langsung Terintegrasi" ini dapat diselesaikan dengan baik

Gagasan Proyek Perubahan ini Aksi Perubahan ini lahir sebagai respon terhadap kondisi pengelolaan data yang masih terfragmentasi, duplikasi, serta rendahnya pemanfaatan data digital di tingkat nagari. Nagari yang merupakan unit pemerintahan terkecil, dan berperan langsung dalam pelayanan publik serta penyediaan data dasar pembangunan memiliki keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur digital, serta belum adanya standar baku dalam sistem informasi menyebabkan data yang dihasilkan seringkali tidak valid, tidak terintegrasi, dan sulit digunakan sebagai dasar kebijakan

Menjawab tantangan tersebut, dilakukan pembinaan perangkat Nagari untuk pengelolaan Sistem Informasi Nagari, menggunakan Platform Open SID yang berbasis open source dan mengintegrasikan ke portal satu data Provinsi Sumatera Barat dan Portal Data Nasional

MANDALA DATA diharapkan menjadi tonggak penting transformasi digital Sumatera Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data, meningkatkan transparansi, serta mendorong partisipasi masyarakat dan peluang investasi berbasis informasi yang akurat.

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada :

Bapak Vasko Ruseimy, selaku mentor yang senantiasa memberikan masukan berharga dalam pengembangan konsep dan implementasi inovasi ini.

Ibu Herita Dewi, selaku coach yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam proses pelaksanaan proyek perubahan ini.

Bapak Rudy Rinaldy, selaku atasan langsung penulis, yang telah memberikan dukungan penuh dan arahan strategis bagi kelancaran program ini.

Tim Efektif dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dan berkontribusi dalam perencanaan, pembangunan, dan penyelesaian aksi perubahan ini sehingga dapat berjalan sesuai harapan.

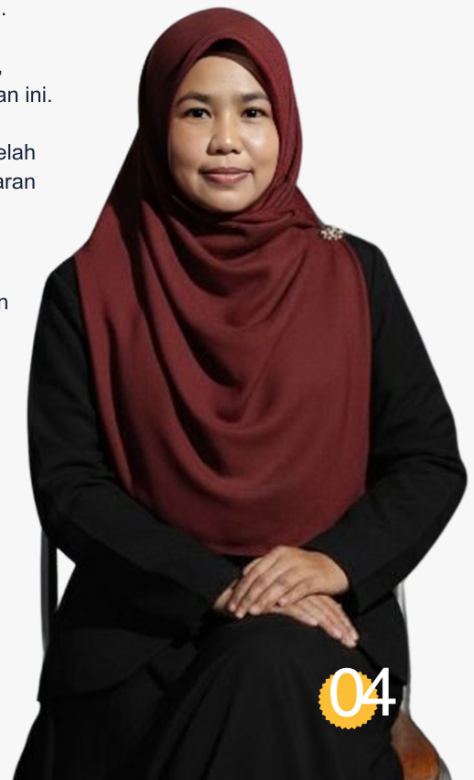


Project Leader
Lizda Handayani, M.Kom



PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
ANGKATAN XX TAHUN 2025

04



DAFTAR ISI

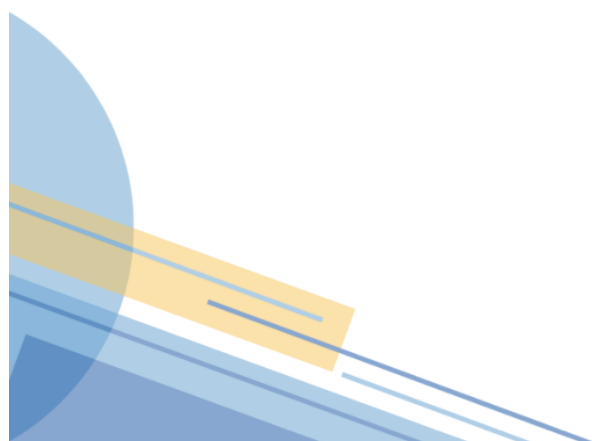
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. EXECUTIVE SUMMARY	1
a. Main Achievements.....	1
b. Benefit.....	1
c. Strategic Leadership.....	2
d. Sustainability.....	3
e. Lesson Learned.....	3
II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tujuan.....	6
C. Manfaat.....	7
D. Analisa Masalah.....	9
E. Strategi Penyelesaian Masalah.....	15
III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	28
a. Capaian Proyek Perubahan.....	28
b. Kepemimpinan Strategis.....	36
c. Implementasi Strategi Marketing.....	41
d. Keberlanjutan Proyek Perubahan.....	45
e. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar.....	50
IV. PENUTUP	55
Kesimpulan.....	55
Saran / Rekomendasi.....	56
Lesson Learn.....	57
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Stakeholder Sebelum Pelaksanaan.....	41
Gambar 3.2 Peta Stakeholder Sesudah Pelaksanaan.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Pikir.....	9
Tabel 2.2 Subdomain Nagari Aktif dan Update.....	10
Tabel 2.3 Subdomain Nagari Aktif, tidak Update.....	10
Tabel 2.4 Subdomain Nagari Tidak Aktif.....	11
Tabel 2.5 Kriteria Terobosan Inovasi.....	16
Tabel 2.6 Tahapan Rencana Proyek Perubahan.....	17
Tabel 2.7 Strategi Marketing.....	21
Tabel 2.8 Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan.....	23
Tabel 2.9 Strategi Pengembangan Kompetensi Proyek Perubahan.....	25
Tabel 2.10 Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri.....	27
Tabel 3.1 Capaian Kegiatan Jangka Pendek.....	28
Tabel 3.2 Daftar Sub Domain.....	35
Tabel 3.3 Daftar Publikasi pada Media Online.....	44



I. EXECUTIVE SUMMARY

a. Main Achievements

Proyek perubahan MANDALA DATA (Mantapkan Nagari Data Langsung Terintegrasi) berhasil merumuskan strategi pengembangan terwujudnya Satu Data Sumatera Barat melalui integrasi data nagari-nagari. Sebagai langkah awal, dilakukan pemetaan kebutuhan data di delapan nagari di Kabupaten Solok untuk memastikan ketersediaan dan kesesuaian informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, dilakukan pengembangan sistem informasi nagari dengan mereplikasi sistem pada OpenSID yang menyesuaikan karakteristik pemerintahan nagari yang kemudian akan diintegrasikan dengan Portal Data Provinsi Sumatera Barat, sehingga data nagari tersebut dapat digunakan secara lintas sektor. Dalam pelaksanaan implementasinya, akan diselenggarakan Bimbingan Teknis bagi perangkat nagari guna meningkatkan literasi digital serta kemampuan pengelolaan data nagari berkelanjutan.

b. Benefit

Keuntungan dalam proyek ini dapat dilihat dari berbagai sisi sebagai berikut:

- Bagi organisasi, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat, proyek perubahan ini akan menonjolkan peran strategisnya sebagai instansi yang mendorong terwujudnya transformasi digital di daerah, penggunaan data valid dan terintegrasi untuk pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dengan target kebijakan berbasis data meningkat minimal 60% di tingkat pemerintahan daerah.
- Bagi pemerintah daerah, terintegrasinya Sistem Informasi Nagari di 8 (delapan) Nagari awal di Kabupaten Solok dan replikasi ke 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 100% Nagari di Kabupaten Solok memiliki portal data aktif dan terintegrasi dalam jangka menengah, 80% perangkat nagari mengikuti Bimbingan Teknis Literasi Digital untuk pengelolaan data, Meningkatnya akses masyarakat ke portal nagari dengan target peningkatan kunjungan portal sebesar 50% dalam satu tahun pertama, ketersediaan data yang valid, akurat, dan terintegrasi akan memberikan landasan yang kuat dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Upaya ini sejalan dengan ketentuan pusat dan daerah, diantaranya seperti yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 4 Tahun 2022.

Kedepannya, kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan bukti (evidence-based policy), sehingga akan lebih tepat sasaran dan efektif.

- Bagi masyarakat, manfaat yang dirasakan adalah meningkatnya transparansi informasi publik dan terbukanya ruang partisipasi dalam proses pembangunan. Melalui portal nagari, masyarakat akan dimudahkan mengakses berbagai informasi penting terkait layanan publik, program pemerintah, hingga potensi lokal yang dimiliki nagari. Hal ini dapat menciptakan ekosistem digital nagari yang mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan.
- Bagi pihak swasta, ketersediaan data yang terintegrasi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi terkait potensi nagari, terbukanya akses data untuk pihak swasta sehingga investasi di nagari meningkat hingga 30% , baik di bidang ekonomi, sumber daya, maupun peluang usaha. Data yang lengkap dan menyeluruh serta dapat dipertanggungjawabkan akan membuka kesempatan bagi investor untuk menjajaki peluang investasi baru. Dengan demikian, proyek ini dapat mendukung terwujudnya ASTA CITA pada poin ke 6 yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan.

c. Strategic Leadership

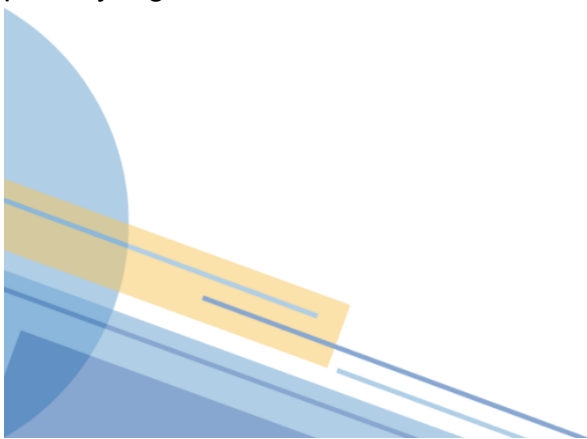
Dalam aspek kepemimpinan strategis, proyek perubahan MANDALA DATA menunjukkan kemampuan untuk memadukan visi digital dengan praktik nyata di lapangan. Dari sisi Digital Leadership, pemanfaatan teknologi open source melalui OpenSID menjadi instrumen utama untuk mengintegrasikan data nagari, yang tidak hanya efisien tetapi juga fleksibel untuk disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Collaborative Leadership tercermin dari kuatnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kabupaten/Kota, Nagari, hingga dukungan pemerintah pusat. Sementara itu, Change Leadership diwujudkan dengan mendorong perubahan budaya kerja aparatur nagari, dari pengelolaan data manual yang rentan terhadap kesalahan menjadi sistem digital terintegrasi yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

d. Sustainability

Keberlanjutan proyek MANDALA DATA ditopang melalui beberapa strategi kunci. Pertama, sistem berbasis OpenSID bersifat open source sehingga memungkinkan dalam melakukan replikasi sistem secara luas tanpa dikenakan biaya lisensi, sehingga sistem nantinya dapat dengan mudah diadopsi oleh berbagai nagari. Kedua, penyusunan roadmap pengelolaan data nagari menjadi pedoman bagi implementasi yang konsisten di 19 kabupaten/kota, sehingga transformasi digital dapat berjalan serentak. Ketiga, adanya mekanisme monitoring, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM nagari memastikan proyek ini tidak berhenti pada tahap awal, melainkan terus berkembang sesuai kebutuhan. Keempat, pengembangan portal Satu Data berbasis nagari menuju Open Data akan menjadi fondasi ekosistem digital yang berkelanjutan di Sumatera Barat, mendukung transparansi, partisipasi publik, dan inovasi berbasis data.

e. Lesson Learned

Dari pelaksanaan proyek perubahan ini, terdapat sejumlah pembelajaran penting yang dapat dijadikan acuan di masa mendatang. Pertama, fragmentasi data yang selama ini menjadi kendala dapat diatasi melalui komitmen bersama serta komunikasi lintas sektor yang efektif. Kedua, penguatan kapasitas SDM nagari terbukti menjadi kunci sukses dalam mendukung implementasi digitalisasi dan integrasi data. Ketiga, pemanfaatan sistem open source terbukti lebih sesuai untuk daerah karena mudah direplikasi, fleksibel, dan tidak membebani anggaran dengan biaya tinggi. Keempat, keberhasilan proyek perubahan sangat bergantung pada dukungan stakeholder yang kuat, baik dari pimpinan, OPD, nagari, hingga masyarakat. Terakhir, transformasi digital tidak hanya soal penerapan teknologi, tetapi juga menuntut perubahan mindset dan budaya kerja ASN untuk lebih adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



II. RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

A. LATAR BELAKANG

● Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), kita memiliki tugas utama untuk melayani masyarakat yang merupakan tanggung jawab hakiki yang melekat pada identitas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini merupakan perwujudan dari tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat, yaitu “Memajukan kesejahteraan umum.” Hal ini dipertegas dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.” Artinya, melayani bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari integritas ASN dalam menjalankan tugas utama demi mewujudkan pelayanan prima untuk masyarakat.

Salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat adalah dengan adanya satu data sebagai fondasi utama yang memungkinkan pelayanan publik berjalan dengan lebih baik dan efisien.

Pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Satu Data, yang mengatur tentang penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat berperan sebagai wali data, sebagai Wali data juga memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, serta membantu pembina data dalam membina produsen data.

Belum maksimalnya implementasi Satu Data Indonesia menjadi tantangan utama dalam sistem pemerintahan dan transformasi digital saat ini. Masih banyak instansi pemerintah yang terjebak dalam ego sektoral, mengelola data sendiri dengan format dan sistem yang berbeda. Hal ini mengakibatkan terjadinya duplikasi dan inkonsistensi dari data itu sendiri. Akselerasi integrasi data lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif dan mendukung visi Indonesia maju 2045.

Pemerintah pusat mendorong percepatan transformasi digital melalui **Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan terintegrasi**. Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi dengan karakteristik adat dan pemerintahan nagari yang kuat,

memiliki tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan tata kelola data yang efektif, efisien, dan partisipatif.

● Satu Data untuk Transformasi Digital sejalan dengan agenda reformasi birokrasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini mengarahkan ASN untuk berperan sebagai pelayan publik yang inovatif, efektif, dan efisien dalam merespons permasalahan masyarakat. Selain itu, penguatan kompetensi ASN dalam mengelola perubahan juga diatur dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Pelatihan Kepemimpinan, yang salah satunya adalah mengembangkan kemampuan ASN dalam implementasi proyek perubahan yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan publik.

Implementasi Satu Data memiliki korelasi dengan Reformasi Birokrasi (RB) Berdampak, terutama pada aspek transformasi digital dan penyederhanaan birokrasi. Dengan menguatkan nagari sebagai produsen data yang terintegrasi, tidak hanya meningkatkan akurasi dan kecepatan, tetapi juga memberdayakan sumber daya manusia di tingkat nagari, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, hanya 45% desa di Indonesia yang memiliki sistem pengelolaan data berbasis digital yang memadai. Kondisi saat ini masih ditemukan fragmentasi data, dimana masing – masing nagari memiliki sistem informasi nagari sendiri tanpa ada standar baku yang seragam dan belum terintegrasi. Sebagian besar nagari masih mengandalkan pengelolaan data manual, yang rentan terhadap kesalahan, duplikasi, dan ketidaksesuaian. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas nagari dalam transformasi digital menjadi sangat krusial dalam mendukung program Satu Data di tingkat provinsi maupun nasional.

Hal ini juga dikuatkan pada Jurnal Ilmu Administrasi Negara dengan judul Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari Satu Data Indonesia yakni mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan **belum terpenuhi** karena tidak semua kementerian, Lembaga dan pemerintah daerah menyediakan datanya pada portal Satu Data Indonesia.

Nagari, sebagai unit pemerintahan terkecil di Sumatera Barat, berperan penting dalam pelayanan publik, pendataan masyarakat, dan pengambilan kebijakan berbasis

lokal. Namun, banyak nagari masih menghadapi kendala dalam integrasi sistem informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.

Saat ini telah banyak berkembang Sistem Informasi untuk pengelolaan data desa/nagari, salah satunya adalah Sistem Informasi Desa (Open SID) yang berbasis *open source*, dimana dengan memanfaatkan Open SID yang telah dilengkapi dengan fitur API (Application Programming Interface) yang memungkinkan aplikasi berbeda untuk saling terhubung dan berbagi data, sehingga integrasi data dapat dilakukan.

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk menguatkan sinergitas antara Pemprov, Kab/Kota dan Nagari dalam terwujudnya satu data Sumatera Barat termasuk penguatan SDM sebagai ujung tombak pengelola data, maka dibuat aksi perubahan dengan judul **STRATEGI PENGEMBANGAN SATU DATA SUMATERA BARAT MELALUI INTEGRASI DATA NAGARI DLM MEWUJUDKAN TRANSFORMASI DIGITAL MENDUKUNG VISI INDONESIA MAJU 2045 - MANDALA DATA (MANTAPKAN NAGARI DATA LANGSUNG TERINTEGRASI)**

B. TUJUAN

• Jangka Pendek

1. Melakukan pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data di 8 Nagari pada Kabupaten Solok
2. Membuat kesepakatan bersama terkait integrasi data antara Dinas Kominfo dan DPMD Kabupaten Solok.
3. Melakukan replikasi aplikasi open Sistem Informasi Desa (Open SID) menjadi Sistem Informasi Nagari untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok
4. Melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Nagari dengan Portal Data Provinsi
5. Pendampingan peningkatan kapasitas SDM berupa Bimbingan Teknis untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok

• Tujuan Jangka Menengah

1. Melaksanakan kajian dan analisis terkait mekanisme pengelolaan data
2. Melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Nagari dengan Satu Data Indonesia
3. Melakukan replikasi Sistem Informasi Desa menysar ke 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
4. Penyusunan *road map* dan penentuan data prioritas nagari di Prov Sumbar

- **Tujuan Jangka Panjang**

Terwujudnya pengembangan satu data Sumatera Barat melalui integrasi data nagari dalam mewujudkan transformasi digital mendukung misi ke 8 (delapan) Sumatera Barat yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital dan Indonesia Maju 2045

C. MANFAAT

1. Bagi Institusi/lembaga

- Sebanyak 8 (delapan) portal Nagari terintegrasi ke portal satu data Provinsi Sumatera Barat.
- Membangun *branding* dan *position* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai sentral wali data, dimana informasi yang diberikan tervalidasi dan terintegrasi sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tidak hanya sebagai *supporting* teknis, tetapi menjadi OPD penggerak utama transformasi digital di pemerintah daerah dalam mengelola data dan informasi publik.
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik khususnya Bidang Siber dan Sandi, lebih mudah melakukan pengawasan keamanan data dikarenakan data tersimpan secara terpusat.

2. Bagi Stakeholders

a. Pemerintah Pusat

- Dengan satu data, akan meningkatkan efisiensi dan birokrasi pelayanan publik
- Meningkatkan transparansi pemerintah dimana masyarakat mudah memantau kinerja instansi pemerintah sehingga memperkuat kepercayaan publik.

b. Pemerintah Daerah

- Terintegrasinya Sistem Informasi Nagari di 8 Nagari awal di Kabupaten Solok dan replikasi ke 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
- Minimal 100% Nagari di Kabupaten Solok memiliki portal data aktif dan terintegrasi dalam jangka menengah
- Sebanyak 80% perangkat nagari mengikuti Bimbingan Teknis literasi digital untuk pengelolaan data
- Pengambilan keputusan pimpinan berdasarkan pada data.

c. Masyarakat

- Melalui portal nagari, masyarakat mendapatkan informasi penting tentang layanan publik, program pemerintah dan dapat mempromosikan potensi nagari ke luar.
- Terlaksananya tata kelola nagari yang lebih baik, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa berdasarkan data dan informasi yang ditampilkan pada portal nagari.
- Dengan tersedianya portal nagari, dapat memperbaiki tata kelola nagari baik dari sisi administrasi, keterbukaan informasi, perekonomian nagari sehingga dapat menciptakan ekosistem digital nagari.

d. Pihak swasta

- Terbukanya akses data untuk pihak swasta menemukan peluang investasi baru di Nagari (perbankan, bumh, pelaku ekonomi kreatif),
- Dengan data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, memudahkan pihak swasta melakukan analisa pasar yang lebih baik.

3. Bagi Project Leader

1. Meningkatkan integritas dan mengembangkan energi kepemimpinan
2. Mengimplementasikan Kepemimpinan strategis meliputi kepemimpinan digital, kepemimpinan kewirausahaan, organisasi pembelajar dan diagnosa organisasi
3. Mengimplementasikan Manajemen strategis yaitu manajemen strategis sektor public, marketing sektor publik, *public private partnership* dan isu strategis
4. Mendapatkan lesson learnt melalui visitasi kepemimpinan nasional dan pelaksanaan proyek perubahan

D. ANALISA MASALAH

1. Kerangka Pikir

Tabel 2.1
Kerangka Pikir

Kondisi Saat Ini

Belum maksimalnya ketersediaan data yang mudah dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan :

1. Dari 74 Nagari di Kabupaten Solok, terdapat 41 Nagari yang belum memiliki Sistem Informasi untuk pengelolaan data desa.
2. Belum optimalnya pendampingan pengelolaan data nagari dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
3. Belum optimalnya literasi digital dan SDM perangkat Nagari
4. Belum adanya integrasi data antara portal Nagari, Kabupaten Solok dan Provinsi

Solusi Inovatif

Jangka Pendek

1. Melakukan pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data untuk Sistem Informasi Nagari
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD, Dinas Kominfo Kab/Kota dan Wali Nagari di Kabupaten Solok
3. Melakukan pengembangan dan integrasi Sistem Informasi Nagari
4. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di Nagari

Jangka Menengah

1. Melaksanakan Focus Group Discussion dengan Dinas Kominfo, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik terkait mekanisme pengelolaan data termasuk mekanisme verifikasi dan pembaharuan data untuk meningkatkan kualitas data
2. Melakukan replikasi Sistem Informasi Nagari ke 19 Kabupaten/Kota
3. Melakukan penyusunan road map dan penentuan data prioritas nagari

Jangka Panjang

1. Melakukan pengembangan portal Satu Data Provinsi menuju Open Data Provinsi
2. Melaksanakan monitoring dari road map pengelolaan data yang telah ditetapkan *government dimulai dari nagari*

Kondisi Yang Diharapkan

1. Terlaksananya integrasi Sistem Informasi Nagari dengan Portal Satu Data Sumatera Barat
2. Tersedianya data yang akurat, mutakhir dan interoperable
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan data yang akurat

a. Kondisi Saat Ini

1. Dari 74 Nagari di Kabupaten Solok, terdapat 41 Nagari yang belum memiliki Sistem Informasi untuk pengelolaan data desa. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok telah membuat subdomain untuk 74 Nagari , dan dari hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 74 sub domain tersebut adalah 17 portal Nagari aktif , 16 portal Nagari aktif tetapi data tidak *update* dan 41 Nagari belum memiliki portal. Hal ini menunjukkan lebih dari 55% Nagari masih menggunakan metode manual atau semi digital dalam pengolahan data Nagari.

Tabel 2.2
Subdomain Nagari Aktif dan Update

No	Nagari	Alamat Web	Update Terakhir
1	Talang Babungo	https://talangbabungo.solokkab.go.id/	Juli 2025
2	Batu Bajaranjang	https://batubajaranjang.solokkab.go.id/	Agustus 2025
3	Koto Gadang Koto Anau	https://kotogadangkotoanau.solokkab.go.id/	Mei 2025
4	Limau Lunggo	https://limaulunggo.solokkab.go.id/	Juli 2025
5	Salayo Tanang Bukik Sileh	https://salayotanangbukitsileh.solokkab.go.id/	April 2025
6	Talang	https://talang.solokkab.go.id/	Agustus 2025
7	Bukit Tandang	https://bukittandang.solokkab.go.id/	Juli 2025
8	Bukit Bais	https://bukitbais.solokkab.go.id/	Agustus 2025
9	Guguak Sarai	https://guguaksarai-slk.desa.id/	Agustus 2025
10	Gantuang Ciri	https://gantuangciri.solokkab.go.id/	Agustus 2025
11	Koto Baru	https://kotobaru.solokkab.go.id/	Agustus 2025
12	Sulit Air	https://sulitair.solokkab.go.id/	Agustus 2025
13	Tanjuang Alai	http://tanjuangalai.solokkab.go.id/	Agustus 2025
14	Singkarak	https://singkarak.solokkab.go.id/	Agustus 2025
15	Panningahan	https://paninggahan.solokkab.go.id/	April 2025
16	Surian	https://surian.solokkab.go.id/	Juli 2024
17	Alahan Panjang	https://alahanpanjang.solokkab.go.id/	November 2024

Tabel 2.3
Subdomain Nagari Aktif, tidak Update

No	Nagari	Alamat Web	Status
1	Rangkiang Luluih	https://rangkiangluluih.solokkab.go.id/	Aktif
2	Garabak Data	https://garabakdata.solokkab.go.id/	Aktif
3	Simanau	https://simanau.solokkab.go.id/	Aktif
4	Koto Laweh	https://kotalaweh.solokkab.go.id/	Aktif
5	Kampung Batu Dalam	https://kampungbatudalam.solokkab.go.id/	Aktif
6	Cupak	https://cupak-slk.desa.id/	Aktif
7	Batang Baru	https://batangbaru.solokkab.go.id/	Aktif

8	Kinari	https://kinari.solokkab.go.id/	Aktif
9	Piangu	https://piangu.solokkab.go.id/	Aktif
10	Sungai Durian	https://sungaidurian.solokkab.go.id/	Aktif
11	Katialo	https://katialo.solokkab.go.id/	Aktif
12	Labuah Panjang	https://labuahpanjang.solokkab.go.id/	Aktif
13	Pasilihan	https://pasilihan.solokkab.go.id/	Aktif
14	Tikalak	https://tikalak.solokkab.go.id/	Aktif
15	Saniang Baka	https://saniangbaka.solokkab.go.id/	Aktif
16	Aripan	https://aripan.solokkab.go.id/	Aktif

Tabel 2.4
Subdomain Nagari Tidak Aktif

No	Nagari	Alamat Web	Status
1	Lolo	https://lolo.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
2	Sungai Nanam	https://sungainanam.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
3	Salimpek	https://salimpek.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
4	Aie Dingin	https://aiedingin.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
5	Sungai Abu	https://sungaiabu.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
6	Sariak Alahan Tigo	https://sariakalahantigo.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
7	Sirukam	https://sirukam.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
8	Supayang	https://supayang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
9	Aie Luo	https://aieluo.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
10	Tanjung Balik Simiso	https://tanjungbaliksimiso.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
11	Batu Banyak	https://batubanyak.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
12	Batu Bajanjang	https://batubajanjang-lj.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
13	Simpang Tanjung Nan IV	https://tanjungnaniv.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
14	Koto Gaek Guguk	https://kotogaekguguk.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
15	Sungai Janiah	https://sungaijaniah.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
16	Koto Gadang Guguk	https://kotogadangguguk.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
17	Jawi-jawi Guguk	https://jawijawiguguk.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
18	Aie Batumbuak	https://aiebatumbuak.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
19	Dilam	https://dilam.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
20	Muaro Paneh	https://muaropaneh.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
21	Parambahan	https://parambahan.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
22	Taruang-Taruang	https://taruangtaruang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif

23	Nagari Siaro-Aro	https://siaroaro.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
24	Nagari Indudur	https://indudur.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
25	Nagari Sungai Jambur	http://sungaijambur.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
26	Nagari Koto Laweh	kotalaweh-sglasi.solokkab.go.id	Tidak Aktif
27	Nagari Gauang	https://gauang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
28	Nagari Panyakalan	http://panyakalan.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
29	Nagari Saok Laweh	saoklaweh.solokkab.go.id	Tidak Aktif
30	Nagari Tanjung Bingkuang	http://tanjungbingkuang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
31	Nagari Koto Hilalang	https://kotohilalang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
32	Nagari Selayo	http://selayo.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
33	Nagari Bukik Kandung	http://bukikkandung.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
34	Nagari Kunci	http://kunci.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
35	Nagari Siberambang	https://sibarambang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
36	Nagari Tanjung Balik	https://tanjungbalik.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
37	Nagari Paninjau	http://paninjau.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
38	Nagari Koto Sani	https://kotosani.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
39	Nagari Kacang	http://kacang.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
40	Nagari Sumani	http://sumani.solokkab.go.id/	Tidak Aktif
41	Nagari Muaro Pingai	https://muaropingai.solokkab.go.id/	Tidak Aktif

2. Belum optimalnya pendampingan pengelolaan data nagari dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum melakukan pendampingan, pelatihan dan monitoring secara sistematis dan berkelanjutan. Sehingga Nagari yang belum memiliki Portal tidak dapat optimal memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengolahan data, serta Nagari yang telah memiliki Portal belum dapat memanfaatkan secara maksimal.
3. Belum optimalnya literasi digital dan SDM perangkat Nagari. Dengan adanya 55% Nagari belum memiliki portal, menandakan bahwa Pemerintah Daerah belum maksimal melakukan pembinaan dan sebagian besar perangkat Nagari belum memiliki kompetensi Digital yang memadai.
4. Belum adanya integrasi data antara portal Nagari , Kabupaten Solok dan Provinsi. Hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme integrasi data yang mensinkronkan secara otomatis data di Portal Nagari ke Portal Data Provinsi dan Kabupaten. Masing- masing Pemerintah berjalan sendiri – sendiri. Hal ini terlihat

pada Portal Satu Data Kabupaten Solok (satudata.solokkab.go.id) dimana hanya terinput 25 sheet data dari Perangkat Daerah, data dari Nagari belum tersedia.

b. Kondisi yang diharapkan

1. Terwujudnya integrasi Sistem Informasi Nagari pada 8 Nagari di Kabupaten Solok dengan Portal Satu Data Sumatera Barat sehingga tersedianya data yang akurat, mutakhir dan interoperable.
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Solok, yang diharapkan berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan data yang akurat.

2. Identifikasi Masalah

Pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2021 - 2026, terdapat permasalahan pada tata kelola data yaitu :

1. Belum Optimalnya Sistem Satu Data Karena Masih Kurangnya SDM Yang Mengelola Database Dan Belum Tersosialisasi.
Saat ini beberapa Nagari yang berada di Sumatera Barat telah memanfaatkan Sistem Informasi untuk mengelola dan menampilkan data administrasi Nagari tetapi belum memiliki standar meta data dan tenaga sebagai pengolah data. Serta belum maksimalnya sosialisasi terhadap Sistem Informasi Nagari yang mengakibatkan kurang tersebarluasnya informasi dan potensi Nagari ke masyarakat.
2. Belum terintegrasinya data pada Sistem Informasi Nagari
Sistem Informasi Nagari yang dibangun belum terintegrasi dengan Portal Data Provinsi dan Nasional, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya duplikasi data.
3. Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari OPD
Data yang tersaji dan terinformasikan pada Sistem Informasi Nagari belum maksimal dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan dikarenakan belum maksimalnya mekanisme pengolahan data.

Pada tingkat Nasional, permasalahan terkait tata kelola data ini adalah :

1. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi didesa, dengan hanya 60% desa yang memiliki akses internet stabil (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024);

2. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data digital, di mana 70% aparatur desa belum terlatih dalam penggunaan teknologi informasi (Laporan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2023);
3. Fragmentasi data antar instansi, yang menyebabkan inefisiensi dalam pengambilan kebijakan. Kendala ini menghambat pencapaian visi Satu Data Indonesia, yang menargetkan integrasi data nasional untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam implementasi integrasi data adalah :

- a. Keterbatasan SDM Nagari dan rendahnya literasi digital
Kurangnya pemahaman terhadapnya pentingnya data di tingkat Nagari sehingga pengelolaan data secara digital belum maksimal, dan perangkat Nagari sering kekurangan tenaga yang terlatih dan menguasai teknologi.
- b. Belum optimalnya pendampingan teknis dari Provinsi dan Kabupaten
Belum adanya tim khusus dari Dinas Kominfo Kabupaten Solok untuk pendampingan digitalisasi Nagari yang berkelanjutan
- c. Kurangnya anggaran dan prioritas untuk digitalisasi Nagari
Kegiatan digitalisasi sering tidak menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.
- d. Belum adanya regulasi teknis untuk integrasi data Nagari.
Belum ada regulasi di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Nagari yang mengharuskan integrasi data di tingkat Pemerintah.
- e. Format data yang tidak terstandar.
Format data dan meta data antar instansi pemerintah belum seragam, sehingga menyulitkan dalam melakukan integrasi
- f. Lemahnya koordinasi dan dukungan antar instansi.
Koordinasi antar instansi, dukungan pimpinan serta dukungan kebijakan anggaran masih kurang yang menyebabkan integrasi data tidak optimal.

3. Dampak

- a. Terjadinya duplikasi data, yang mengakibatkan kurangnya efektivitas pengelolaan data di tingkat Nagari, Kabupaten dan Provinsi
- b. Pengambilan keputusan tidak efisien karena data yang terpisah

- c. Kurang optimalnya kualitas layanan publik dikarenakan baik Provinsi dan Kabupaten tidak mempunyai data yang akurat.
- d. Kepercayaan masyarakat berkurang karena data tidak terbuka dan tidak mudah untuk diakses.

E. STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

1. Terobosan Inovatif

Inovasi yang diusulkan untuk mengatasi masalah diatas adalah membangun Strategi pengembangan satu data Sumatera Barat melalui integrasi data nagari dengan upaya – upaya yang dilakukan melalui langkah – langkah yang terstruktur dan inovatif, sebagai berikut :

a. Integrasi Data

Integrasi Data dimulai dengan melakukan pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data di 8 (delapan) Nagari pada Kabupaten Solok. Integrasi data bertujuan untuk mengatasi fragmentasi dan duplikasi data antara nagari dan pemerintah provinsi yang selama ini masih terjadi. Data Nagari akan diintegrasikan ke Portal Satu Data Provinsi Sumatera Barat.

b. Komitmen Bersama

Integrasi Data tidak akan terwujud jika tidak ada kesepakatan bersama antara Dinas Kominfo dan DPMD Kabupaten Solok.

c. Replikasi Sistem

Melakukan replikasi aplikasi open Sistem Informasi Desa (Open SID) menjadi Sistem Informasi Nagari untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok

d. Literasi Digital

Pendampingan peningkatan kapasitas SDM berupa Bimbingan Teknis untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok

e. Kedaulatan Data

Dengan konsep integrasi data yang bersumber dari data nagari, maka akan terwujud kedaulatan data Nagari, dimana Nagari masih mengelola dan memiliki datanya secara mandiri.

Proyek perubahan “MANDALA DATA” merupakan sebuah terobosan inovasi karena memenuhi kriteria Kebaruan (novelty) dalam sebuah perubahan, Dampak positif dan manfaat, solusi terhadap permasalahan pokok,

berkesinambungan dan dapat direplikasikan, dan memiliki kompatibilitas sebagaimana diuraikan pada tabel 2.5 :

Tabel 2.5
Kriteria Terobosan Inovasi

No	Kriteria	Terobosan Inovasi
1	Kebaruan (novelty) dalam sebuah perubahan	<ul style="list-style-type: none"> Menciptakan kebaruan dengan fokus pada penguatan Nagari sebagai produsen data yang terintegrasi, sebelumnya masih terfragmentasi dan manual, dengan mereplikasi sistem OpenSID (Sistem Informasi Desa) dan menyesuakannya menjadi Sistem Informasi Nagari yang spesifik untuk karakteristik Sumatera Barat, kemudian mengintegrasikannya langsung dengan Portal Data Provinsi. Penggunaan teknologi open source (OpenSID) yang memanfaatkan fitur API untuk memungkinkan aplikasi berbeda saling terhubung dan berbagi data, menjadi instrumen utama dalam integrasi data di tingkat nagari.
2	Dampak positif dan manfaat	<ul style="list-style-type: none"> Menegaskan peran strategis Diskominfotik sebagai pendorong transformasi digital daerah dan wali data, dengan target peningkatan kebijakan berbasis data minimal 60%. Ketersediaan data yang valid, akurat, dan terintegrasi menjadi landasan kuat untuk evidence-based policy (kebijakan berbasis bukti). Targetnya, 100% Nagari di Kab. Solok memiliki portal data aktif dan terintegrasi dalam jangka menengah
3	Solusi terhadap permasalahan pokok	Mengatasi Fragmentasi Data dengan menyediakan solusi berupa Sistem Informasi Nagari terstandar (replikasi OpenSID) dan mekanisme integrasi data otomatis ke Portal Data Provinsi, mengatasi masalah data yang dikelola sendiri dan inkonsisten antar instansi untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan interoperable (dapat dibagipakaikan)
4	Berkesinambungan dan dapat direplikasikan	Sistem open source (OpenSID) yang memungkinkan replikasi sistem tanpa biaya lisensi tinggi. Selain itu, adanya roadmap pengelolaan data nagari untuk implementasi konsisten di 19 kabupaten/kota, serta mekanisme monitoring, evaluasi, dan penguatan kapasitas SDM berkelanjutan.
5	Memiliki kompatibilitas	Mendukung visi Indonesia Maju 2045 dan misi ke-8 Sumatera Barat, yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital.

2. Pentahapan Proyek Perubahan

Tabel 2.6
Tahapan Rencana Proyek Perubahan

No	Milestone	Tahapan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															Hasil /Output	Pihak Terdampak
				Ags					Sept					Okt						
I				I	I	II	II	IV	V	I	II	III	IV	V						
1	Melakukan pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data untuk Sistem Informasi Nagari															Tersedianya dokumen pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data nagari di kabupaten Solok	Project Leader, Tim Efektif			
		Penyusunan Tim Efektif														Tersedianya SK Tim Efektif	Project Leader			
			Konsultasi dengan mentor													<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen dukungan mentor • Dokumentasi 	Mentor, Project Leader			
			Melaksanakan Rapat pembentukan Tim													<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Dokumentasi • Notulen 	Project Leader, Tim Efektif			
			Penyusunan SK Tim													SK Tim	Project Leader, Tim Efektif			
			Melaksanakan rapat kegiatan (awal)													Pembahasan awal terhadap konsep integrasi data nagari dan rencana kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar hadir • Dokumentasi • Notulen 	Project Leader, Tim Efektif			
		Identifikasi dan Inventarisasi Portal Nagari di pilot project														<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya data portal nagari • Tersusunnya kebutuhan data nagari 	Project Leader, Tim Efektif, OPD			

			Koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Dinas Pemberdayaan Desa Kab. Solok															<ul style="list-style-type: none"> • Undangan • Daftar Hadir • Dokumentasi • Notulen 	Project Leader, Tim Efektif, OPD
			Melakukan inventarisasi kebutuhan data															Dokumen kebutuhan data	Project Leader, Tim Efektif
2	Membuat kesepakatan bersama terkait integrasi data antara Dinas Kominfo dan DPMD Kabupaten Solok																	Dokumen kesepakatan/dukungan	Project Leader, Tim Efektif, OPD
		Membuat dokumen kesepakatan																	
			Merancang draft kesepakatan bersama															Draft dokumen	Project Leader, Tim Efektif
			Penandatanganan kesepakatan															Dokumen dukungan	Project Leader, Tim Efektif, OPD
3	Melakukan replikasi aplikasi open Sistem Informasi Desa (Open SID) menjadi Sistem Informasi Nagari untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok																	Tersedianya Sistem Informasi Nagari	Project Leader, Tim Efektif
		Perancangan Sistem Informasi Nagari																Tersedianya layout portal nagari	Project Leader, Tim Efektif
			Pembuatan design tampilan portal															Tersedianya design portal	Project Leader, Tim Efektif

			Pembuatan <i>backend</i> portal												Tersedianya backend portal	Project Leader, Tim Efektif
4	Melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Nagari dengan Portal Data Provinsi														Terlaksananya integrasi Sistem Informasi Nagari ke Portal Data Provinsi Sumatera Barat	Project Leader, Tim Efektif
		Merancang API													Tersedianya daftar API	
			Melaksanakan pembuatan API terhadap data yang akan diintegrasikan												Daftar API	Tim Efektif
		Uji coba integrasi														
			Melaksanakan uji coba keterhubungan data												Keterhubungan data	Project Leader, Tim Efektif
5	Melakukan Bimbingan Teknis untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok														Terlaksananya sosialisasi dan Bimtek untuk perangkat nagari, UMKM, Penyuluh Pertanian	Project Leader, Tim Efektif, OPD
		Bimbingan Teknis														
			Bimtek Penggunaan Sistem Informasi Nagari di kab. Solok												Undangan Daftar Hadir Laporan Kegiatan Dokumentasi	Project Leader, Tim Efektif, Perangkat Nagari
II	Jangka Menengah															
		Melaksanakan Focus Group Discussion dengan Dinas Kominfo, Bappeda Kabupaten/Kota, Badan Pusat Statistik terkait mekanisme pengelolaan data termasuk mekanisme verifikasi dan pembaharuan data untuk meningkatkan kualitas data														
		Melakukan replikasi Sistem Informasi Nagari ke 19 Kabupaten/Kota														
		Melakukan penyusunan road map dan penentuan data prioritas nagari														

III	Jangka Panjang	
		Pengembangan portal Satu Data berbasis Nagari menuju Open Data
		Monitoring pelaksanaan Road Map pengelolaan data

3. Rencana Strategi Marketing

Strategi Publikasi (diseminasi, komunikasi, sosialisasi) proyek perubahan yang efisien, efektif dan modern dengan memanfaatkan berbagai strategi komunikasi terkini untuk memperoleh dukungan dalam pelaksanaan proyek perubahan.

Marketing sector public adalah serangkaian aktifitas dan proses saling berhubungan untuk mengidentifikasi, menciptakan, berkomunikasi dalam rangka melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Menurut Widjayanti (2011) *marketing* disini memiliki dua peran :

- a. Untuk membantu mempromosikan *outcome* yang saling memuaskan yang telah dicapai.
- b. Untuk membujuk stakeholder ikut berperan serta dalam rangka mencapai *outcome*.

Strategi *marketing* terhadap hasil proyek perubahan dilakukan dengan memperhatikan elemen dalam pemasaran sektor publik, yaitu: **1 C 4 P** (*Customer, Product, Price, Place & Promotion*).

Tabel 2.7
Strategi Marketing

Elemen	Strategi Marketing
Customer <ul style="list-style-type: none">• Pemerintah Daerah• Perangkat Nagari• Masyarakat• Swasta	Rapat Koordinasi, FGD Data Sektoral, Bimbingan Teknis dan Pendampingan Berkelanjutan Kampanye Edukasi Digital Webinar / FGD
Product <ul style="list-style-type: none">• Sistem Informasi Nagari• Mekanisme Integrasi Data• Data yang akurat dan interoperable• Peningkatan SDM	Replikasi dan modifikasi OpenSID Menggunakan fitur API OpenSID SOP Bimbingan Teknis
Price	Penggunaan Open Source (tanpa biaya) Pengurangan cost akibat duplikasi data Peningkatan efisiensi layanan
Place Diskominfo Prov. Sumbar Dinas PMD dan Kominfo Kab/Kota	Portal Satu Data Provinsi Sumbar Sistem Informasi Nagari

Promotion Digital Branding Awareness Edukasi dan Pelatihan Public Relations Digital Collaborative Marketing	Media Sosial Diskominfo (Instagram, Facebook) Webinar Series / <i>E-Learning</i> Rilis Pers Digital di website resmi dan media <i>online</i> lokal/nasional Kampanye bersama dengan BPS, Bappeda, dan DPMD Kabupaten/Kota
---	--

Penjelasan dari strategi marketing MANDALA DATA adalah sebagai berikut :

1. Costumer

Adalah pihak yang akan menerima manfaat atau pengguna produk dari hasil proyek perubahan yaitu :

- a. Pemerintah Daerah : Membutuhkan data yang valid, akurat, terintegrasi untuk *evidence-based policy*, strategi marketing adalah Internal *Socialization* (Rapat Koordinasi, FGD Data Sektoral) untuk adopsi data dari Portal Provinsi.
- b. Perangkat Nagari : Membutuhkan kemudahan dalam mengelola data digital dan pelatihan untuk meningkatkan literasi digital, strategi marketingnya adalah bimbingan teknis
- c. Masyarakat : Membutuhkan transparansi, akses informasi publik, dan ruang partisipasi pembangunan, strategi marketingnya adalah Edukasi Digital melalui media sosial/website tentang manfaat *Open Data* Nagari
- d. Swasta : Membutuhkan akses data potensi nagari yang terintegrasi untuk analisis pasar dan peluang investasi, strategi marketingnya adalah *Business Matching* Event (Webinar/FGD) yang menggunakan data dari Portal Provinsi.

2. Product

Mandala Data menjual solusi integrasi data dengan manfaat yang diberikan :

- a. Sistem Informasi Nagari, strateginya adalah Replikasi dan modifikasi OpenSID menjadi Sistem Informasi Nagari yang spesifik untuk karakteristik Sumbar
- b. Mekanisme Integrasi Data, dengan strateginya menggunakan fitur API OpenSID untuk memastikan data Nagari **langsung terintegrasi** dan *real-time* ke Portal Data Provinsi, mengatasi fragmentasi data
- c. Program Peningkatan Kapasitas SDM, dengan strateginya **bimbingan Teknis Literasi Digital** bagi perangkat Nagari (target 80% perangkat) untuk memastikan keberlanjutan input data secara *daring* dan *luring*

3. Price

Dalam implementasi Mandala Data, pembuatan Sistem Informasi Nagari menggunakan OpenSID (open source) yang tidak memerlukan pembayaran lisensi. Pemanfaatan OpenSID mengakibatkan penghematan dari sisi biaya pembuatan website sebesar 80%

4. Place

Strategi distribusi Mandala Data, Sistem Informasi Nagari merupakan pintu masuk utama pengolahan data Nagari untuk diintegrasikan ke Portal Data Provinsi Sumatera Barat. Dinas PMD dan Diskominfo Kabupaten Solok sebagai pendamping ditingkat lokal.

5. Promotion

Pemanfaatan Teknologi Digital menjadi inti promosi dengan jenis promosi yaitu *digital branding*, pelatihan, *publik relations digital* melalui kanal instagram dengan akun mandala.data

4, Rencana Mata Pelatihan Mendukung Proyek Perubahan

Mata Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II memberikan fondasi yang kuat untuk membekali project leader dengan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang diperlukan untuk berhasil dalam implementasi proyek perubahan. Adapun mata pelatihan pendukung implementasi proyek perubahan dan keterkaitan dengan proyek perubahan yang dilaksanakan sebagaimana tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Keterkaitan dengan Mata Pelatihan Pilihan

No.	Judul Aksi Perubahan	Mata Pelatihan	Jalur Pembelajaran	Hubungan dengan Aksi perubahan	Sumber Pembelajaran
1.	Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045	<i>Digital Skill</i> dalam penyusunan kebijakan	Pembelajaran tatap muka kelompok	mampu mengembangkan rencana pelayanan publik digital yang sesuai dengan ruang lingkup organisasi yang diindikasikan, kebijakan <i>kepemimpinan digital</i> , mengidentifikasi ragam inovasi <i>model kepemimpinan digital</i> dan mengidentifikasi tantangan kepemimpinan digital untuk pengambilan keputusan.	Modul Digital Skill

2		Diagnosa Organisasi	Blind Learning, Classical	Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan publik, maka aksi perubahan ini dibuat guna melakukan penyesuaian/adaptasi/p erubahan terhadap perubahan lingkungan guna menjamin efektifitas pelayanan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra kerja dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Modul PKA "Diagnosa Organisasi" LAN RI Tahun 2021
		Pelayanan Publik	Blind Learning, Classical	Konsep Pelayanan ideal memberikan panduan dalam pelaksanaan proyek perubahan terkait strategi kepatuhan pelaksanaan SKM	Modul Pelayanan Publik : Manajemen Pemerintahan

5. Rencana Strategi Pengembangan Kompetensi Dalam Proyek Perubahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan

Bentuk pengembangan kompetensi PNS, sesuai dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari pendidikan dan/atau pelatihan.

Tabel 2.9
Strategi Pengembangan Kompetensi Proyek Perubahan

Yang Terdampak	Perubahan Kompetensi yang dibutuhkan	Cara Pengembangan
Tim Efektif	Peningkatan integritas	Mengikuti pelatihan mandiri
Perangkat Nagari	Peningkatan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi.	Melakukan literasi digital, Bimbingan Teknis, <i>Benchmarking</i>
Perangkat Daerah	Memperkuat kerjasama dan menjaga kesinambungan	Melakukan pertemuan rutin
Perangkat Daerah	<i>Sharing Knowledge</i>	Melakukan <i>Sharing Knowledge</i> dan <i>Best Practices</i> : Mengadakan sesi <i>sharing knowledge</i> dan <i>best practices</i> antar perangkat daerah mengenai pelaksanaan SKM. Ini akan mendorong pertukaran informasi dan pengalaman sehingga setiap perangkat daerah dapat belajar dari satu sama lain untuk meningkatkan kepatuhan dan kualitas survei.
Tim Efektif	Mendapatkan peningkatan Kemampuan Strategi Komunikasi Marketing Digital	Workshop Strategi Komunikasi Marketing Digital: Workshop untuk membangun kemampuan menyusun dan menjalankan strategi komunikasi marketing berbasis digital, meliputi pemasaran media sosial, content marketing, dan search engine optimization (SEO).
Tim Efektif	Meningkatkan Kompetensi Digital	Pelatihan dasar dan lanjutan tentang penggunaan teknologi digital (software, tools, dan platform) yang mendukung proyek perubahan.

6. Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

a. Hasil Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan

Pemetaan potensi diri dapat digunakan untuk mengenal kompetensi diri sendiri baik kompetensi manajerial, kompetensi teknis maupun kompetensi sosial kultural sebagaimana standar kompetensi jabatan ASN yang diatur dalam Peraturan Menteri pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. dalam hal kemampuan manajerial, seperti memimpin.

Berdasarkan isian model *assessment* yang menggunakan *perceptual judgement* (berbasis persepsi) terhadap perilaku-perilaku praktis seseorang di

lingkungan kerja menjadi salah satu alternatif pendekatannya. Dalam rancangan proyek perubahan ini persepsi penilaian memadukan penilaian dari *project leader (Self Assessment)* dengan penilaian dari atasan langsung (mentor), sebagai berikut :

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Lizda Handayani		Nama Mentor	: Vasko Ruseimy	
NIP	: 197501212002122000		NIP:	: 0	
Jabatan	: Kepala Bidang Aplikasi Informatika		Jabatan	: Wakil Gubernur	
Instansi	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provins		Instansi	: 0	
Program	: Diklat PKN II Angkatan XX				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,08	8,20	8,10	8,13	Baik
Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,73	8,76	8,73	8,74	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi	9.00-10 Istimewa		Akhir Sikap Perilaku		
	7-8.99 Baik		8,74		
	5-6.99 Cukup		Kualifikasi:		
	3-4.99 Kurang		Baik		
	1-2.99 Sangat Kurang				

Berdasarkan hasil pemetaan sikap perilaku kepemimpinan yang dinilai bersama Mentor, dengan nilai:

- Integritas, sebesar **8,73**, dengan kualifikasi **Baik**
- Kerjasama, sebesar **8,76**, dengan kualifikasi **Baik**
- Mengelola Perubahan, sebesar 8,72 dengan kualifikasi Baik.
- **Nilai akhir Sikap Perilaku Kepemimpinan, sebesar 8,74, dengan kualifikasi Baik. Rekomendasinya** adalah: diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas.

b. Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

Berdasarkan hasil pemetaan sikap perilaku diatas maka strategi pengembangan potensi diri yang akan dilaksanakan pada implementasi proyek perubahan di fokuskan pada menjaga sub komponen yang telah masuk dalam kualifikasi Istimewa serta mempertahankan dan meningkatkan sub komponen yang masih dalam kualifikasi baik, sebagai berikut :

Tabel 2.10
Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri

<p>Berkaitan hasil tersebut, diperlukan Rencana Strategi Pengembangan Potensi Diri yang akan di implementasi aksi perubahan sebagai berikut: Integritas</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti pelatihan etika dalam pelayanan publik untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan. b. Mengadakan workshop yang fokus pada transparansi dan akuntabilitas dalam bekerja, termasuk simulasi situasi yang membutuhkan keputusan berbasis integritas. c. Membentuk Tim zona integritas untuk memperkuat integritas kolektif di Diskominfo d. Membuat Komitmen berintegritas dalam Pakta Integritas, mendeklarasikan tekad untuk bertindak dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab bersama staf Diskominfo e. Menjadikan “ASN Berintegritas” sebagai moto Diskominfo dalam bekerja f. Mengadakan pertemuan bulanan dengan staf, untuk memberi motivasi pentingnya nilai-nilai berintegritas dalam bekerja.
<p>Kerjasama</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti program pelatihan tim building yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi efektif, dan kolaborasi antar tim. b. Melakukan sesi feedback dan refleksi secara rutin dengan tim untuk memperbaiki dinamika kerjasama dan memastikan semua anggota merasa didengar dan dihargai. c. Membangun kanal-kanal interaktif secara digital seperti media sosial, agar mendapatkan feedback dari masyarakat terkait kinerja layanan publik di Diskominfo, hal ini dalam rangka mendorong kerjasama interaktif bersama masyarakat sebagai pemberi masukan.
<p>Mengelola Perubahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pelatihan khusus dalam manajemen perubahan, termasuk strategi dalam menghadapi resistensi dan cara efektif mengkomunikasikan perubahan kepada tim. • Mendorong staf untuk menciptakan inovasi, dan memberikan apresiasi bagi staf yang berhasil menghasilkan inovasi dalam perbaikan kinerja organisasi dalam rangka menghadapi perubahan • Melakukan pertemuan bulanan dengan staf, untuk membahas isu-isu perubahan dan mempersiapkan tindakan preventifnya • Menyusun strategi komunikasi efektif untuk mengajak stakeholder bekerja sama dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pelaksanaan satu data.

- Melakukan pengawasan secara rutin selama masa implementasi perubahan untuk memastikan rencana program dan kegiatan berjalan sesuai jadwal.

III. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

a. Capaian Proyek Perubahan

Pelaksanaan proyek perubahan Mandala Data (Mantapkan Nagari Data Langsung Terintegrasi) : Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045 telah menunjukkan kemajuan yang signifikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan utama yang menjadi indikator keberhasilan proyek dapat direalisasikan secara tepat waktu dan sesuai sasaran. Proses implementasi berjalan melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Solok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok, 17 Wali Nagari di Kabupaten Solok, serta dukungan dari Perkumpulan Desa Digital sebagai pengembang platform OpenSID. Upaya kolaboratif ini menghasilkan sejumlah capaian penting, antara lain Penandatanganan Dokumen Kesepakatan Bersama Integrasi Data antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Solok, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok, Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Nagari pada 17 Nagari di Kabupaten Solok dan Integrasi Data pada 8 (delapan) Sistem Informasi Nagari Kabupaten Solok ke Portal Satu Data Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proyek perubahan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga telah memberikan dasar kuat bagi replikasi dan keberlanjutan program di masa mendatang.

Tabel 3.1
Capaian Kegiatan Jangka Pendek

No	Uraian Kegiatan	Rencana	Realisasi	Ket
1	Melakukan pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data di 8 Nagari pada Kabupaten Solok	1 Dokumen	1 Dokumen	Tercapai
2	Membuat kesepakatan bersama terkait integrasi data antara Dinas Kominfo dan DPMD Kabupaten Solok	2 Surat Komitment	1 Surat Komitment	Tercapai
3	Melakukan replikasi aplikasi open Sistem Informasi Desa (Open SID)	8 Nagari	16 Nagari	Melebihi Target

	menjadi Sistem Informasi Nagari untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok			
4	Melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Nagari dengan Portal Data Provinsi	8 Nagari	8 Nagari	Tercapai
5	Pendampingan peningkatan kapasitas SDM berupa Bimbingan Teknis untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok	8 Nagari	16 Nagari	Melebihi Target

Sebagai langkah awal pelaksanaan Proyek Perubahan Mandala Data, Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat melaksanakan rapat awal pembentukan Tim Efektif pada tanggal 4 September 2025. Rapat ini diikuti oleh Kepala Dinas, Pranata Komputer di Bidang Aplikasi Informatika. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada seluruh anggota Tim Efektif mengenai arah, bentuk kerja, dan capaian yang diharapkan dari proyek perubahan. Dalam rapat tersebut dijelaskan struktur tim, pembagian peran sesuai dengan bidang keahlian, serta rencana kerja yang akan dilaksanakan secara bertahap. Setiap anggota tim diberikan gambaran yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawabnya, sehingga memiliki komitmen dan semangat yang sama dalam mendukung keberhasilan proyek. Melalui penyamaan persepsi ini, seluruh anggota tim diharapkan mampu bekerja secara kolaboratif, efektif, dan terarah dalam mewujudkan tujuan proyek perubahan, yaitu Integrasi Data Nagari untuk Satu Data Sumatera Barat dalam menuju Transformasi Digital Menuju Indonesai Emas 2045.

1. Pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data di 8 Nagari pada Kabupaten Solok

Langkah awal dalam pelaksanaan proyek perubahan MANDALA DATA dimulai dengan kegiatan pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data di 8 (delapan) nagari yang ditetapkan sebagai lokasi percontohan di Kabupaten Solok. Pemetaan ini merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mendokumentasikan jenis data yang dibutuhkan oleh Nagari sebagai design pengembangan Sistem Informasi Nagari yang memanfaatkan platform OpenSID.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif dan observatif, yang melibatkan Bidang APTIKA pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok. Tim

Efektif melakukan kunjungan Dinas tersebut di Kabupaten Solokl untuk menggali informasi terkait kondisi eksisting pengelolaan daa dan Sistem Informasi Nagari yang digunakan.

Analisis terhadap hasil pemetaan mengungkapkan bahwa dari 74 nagari di Kabupaten Solok, sebanyak 41 nagari belum memiliki Sistem Informasi yang memadai. Bahkan dari 74 subdomain yang telah disiapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Solok, hanya 17 portal nagari yang aktif dan terbaru, sementara 16 portal aktif namun tidak diperbarui, dan sisanya belum aktif sama sekali. Fakta ini menunjukkan bahwa lebih dari 55% nagari belum memiliki infrastruktur digital yang mendukung pengelolaan data secara optimal. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam mewujudkan integrasi data nagari sebagai bagian dari Satu Data Sumatera Barat.

Sebagai tindak lanjut dari pemetaan, dilakukan klasifikasi kebutuhan data berdasarkan sektor pelayanan publik, potensi lokal, dan indikator pembangunan. Data yang dikategorikan meliputi data kependudukan, data sosial ekonomi, data infrastruktur, serta data kelembagaan nagari. Inventarisasi ini bertujuan untuk menyusun kerangka kerja sistem informasi nagari yang relevan, efisien, dan dapat diintegrasikan dengan Portal Data Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, hasil pemetaan menjadi dasar dalam merancang pelatihan dan pendampingan teknis bagi perangkat nagari, agar mereka mampu mengelola data secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, langkah pemetaan dan inventarisasi kebutuhan data ini tidak hanya berfungsi sebagai fondasi teknis dalam pembangunan sistem informasi nagari, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendiagnosis kesiapan digital di tingkat lokal. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis bukti, proyek MANDALA DATA mampu mengidentifikasi celah dan potensi yang ada, serta merumuskan solusi yang tepat guna dalam mendukung transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun hasil inventarisasi ini adalah :

a. Data Nagari

- Data Identitas Nagari
- Data Lokasi Nagari (**Latitude, Longitude**)

- Data Peta Wilayah Nagari
- Data Wilayah Administratif (Data Nama Jorong dan NIP jorong)
- Data Perangkat Nagari
- Data Peraturan-peraturan Nagari
- Data Keputusan Nagari
- Data Inventaris Nagari
- Data Visi dan Misi Nagari
- Data Struktur Organisasi Nagari
- Data Lembaga-lembaga yang ada
- Data Penduduk
- Data Kelompok Masyarakat
- Data Keuangan Nagari (APBDes)

b. Data GIS

- Data Wilayah Nagari
- Data Wilayah Jorong
- Data Sekolah
- Data Fasilitas Kesehatan (posyandu, puskesmas dll)
- Data Lokasi Wisata
- Data Gis Lainnya

c. Data UMKM

- Data UMKM (nik, nomor HP dan lokasi)
- Data Produk (Nama Produk, deskripsi, harga dan satuan)

Dokumentasi Kegiatan dapat dilihat di <https://h7.cl/Rapat-Inventarisasi-Data>

2. Kesepakatan Bersama Terkait Integrasi Data Antara Dinas Kominfo Dan DPMD Kabupaten Solok

Langkah kedua dalam pelaksanaan proyek perubahan MANDALA DATA adalah membangun kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Dinas Kominfo Kabupaten Solok. Kesepakatan ini merupakan bentuk komitmen formal dan strategis untuk menyatukan visi, misi, serta langkah operasional dalam mewujudkan integrasi data nagari sebagai bagian dari Satu Data Sumatera Barat.

Dinas Kominfo berperan sebagai wali data yang memastikan validitas, interoperabilitas, dan keamanan data, sedangkan DPMD sebagai pembina data

bertanggung jawab dalam pembinaan dan penguatan kapasitas nagari sebagai produsen data.

Analisis terhadap dinamika koordinasi menunjukkan bahwa sebelumnya belum terdapat mekanisme formal yang mengatur integrasi data antara kedua instansi. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih peran, fragmentasi sistem, serta rendahnya efektivitas pemanfaatan data nagari dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya kesepakatan bersama, tercipta sinergi kelembagaan yang memungkinkan proses integrasi berjalan lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan. Kesepakatan ini juga menjadi dasar hukum dan administratif dalam pelaksanaan kegiatan teknis seperti replikasi sistem informasi, pelatihan SDM, dan pengembangan portal data.

Kesepakatan bersama ini mencerminkan prinsip kolaborasi lintas sektor yang menjadi fondasi dalam transformasi digital pemerintahan daerah. Dengan menyatukan komitmen antara Kominfo dan DPMN, MANDALA DATA tidak hanya memperkuat tata kelola data, tetapi juga membangun ekosistem kerja yang saling mendukung dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Kesepakatan ini menjadi titik balik penting dalam mengatasi ego sektoral dan membuka jalan bagi integrasi data yang lebih luas di tingkat kabupaten dan provinsi.

Dokumentasi dapat dilihat pada (<https://h7.cl/dokkesepakatan>)

3. Replikasi Aplikasi Open Sistem Informasi Desa (Open SID) Menjadi Sistem Informasi Nagari Untuk 8 (Delapan) Nagari Di Kabupaten Solok

Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Desa (OpenSID) menjadi Sistem Informasi Nagari yang disesuaikan dengan karakteristik pemerintahan nagari di Kabupaten Solok. Dalam konteks ini, replikasi bukan hanya penggandaan teknis, melainkan proses adaptasi dan pengembangan sistem agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendukung integrasi data lintas sektor.

Proses replikasi dimulai dengan analisis struktur dan fitur OpenSID yang telah tersedia sebagai perangkat lunak sumber terbuka (open source). Tim teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian terhadap modul-modul utama seperti data kependudukan, layanan administrasi,

potensi nagari, dan pelaporan keuangan. Dari hasil kajian tersebut, dilakukan modifikasi terhadap antarmuka pengguna, struktur metadata, serta penambahan fitur integrasi Application Programming Interface (API) agar sistem dapat berkomunikasi langsung dengan Portal Data Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya, Sistem yang telah disesuaikan diinstal dan dikonfigurasi pada 16 sub domain Nagari yang telah disiapkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Solok. 16 (enam belas) nagari yang menjadi percontohan. Proses ini melibatkan perangkat nagari dalam pelatihan penggunaan sistem. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun benar-benar dipahami, dimiliki, dan dapat dioperasikan secara mandiri oleh nagari. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap konten lokal seperti bahasa, struktur pemerintahan, dan jenis layanan publik yang tersedia di masing-masing nagari.

Analisis terhadap pelaksanaan replikasi menunjukkan bahwa penggunaan OpenSID sebagai basis Sistem informasi Nagari memberikan sejumlah keuntungan strategis. Pertama, open source memungkinkan pengembangan tanpa biaya lisensi, sehingga efisien dari sisi anggaran. Kedua, fleksibilitas sistem memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan lokal tanpa mengorbankan standar teknis. Ketiga, keberadaan fitur API membuka peluang integrasi data secara otomatis dan real-time dengan portal provinsi, sehingga mendukung prinsip interoperabilitas dan validitas data.

Dengan demikian, langkah replikasi ini tidak hanya menjawab tantangan teknis dalam pengelolaan data nagari, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan nagari sebagai produsen data yang kredibel. Sistem Informasi Nagari hasil replikasi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan Satu Data Sumatera Barat yang berbasis nagari, sekaligus menjadi fondasi bagi transformasi digital yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat pemberdayaan lokal jika dikembangkan dengan pendekatan kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

Dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada

<https://drive.google.com/drive/folders/1OXtgEontCwvRsuUfMOHvWdgV8HBxE48s?usp=sharing>

4. Integrasi Data Antara Sistem Informasi Nagari Dengan Portal Data Provinsi

Proses integrasi dimulai dengan pengembangan mekanisme teknis berupa Application Programming Interface (API), yang memungkinkan sistem informasi nagari berkomunikasi langsung dengan portal provinsi. API ini dirancang agar dapat mentransfer data secara otomatis, real-time, dan sesuai dengan standar metadata yang telah ditetapkan oleh wali data provinsi. Tim teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan pengujian interoperabilitas sistem, memastikan bahwa struktur data, format, dan protokol komunikasi antara kedua sistem berjalan lancar dan aman.

Selanjutnya, dilakukan validasi data yang akan diintegrasikan. Validasi ini mencakup pemeriksaan kelengkapan, akurasi, dan konsistensi data dari masing-masing nagari. Data dikirimkan ke portal provinsi melalui API, dan ditampilkan dalam format yang dapat diakses oleh publik maupun instansi pemerintah.

Analisis terhadap pelaksanaan integrasi menunjukkan bahwa sebelumnya belum terdapat sistem yang mampu menghubungkan data nagari secara langsung dengan portal provinsi. Akibatnya, data nagari tidak tersedia dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi, dan terjadi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah. Dengan adanya integrasi ini, data dari nagari menjadi bagian dari ekosistem informasi provinsi, sehingga mendukung perencanaan yang berbasis bukti (evidence-based policy), mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas publik.

Secara substantif, langkah integrasi ini merupakan wujud nyata dari transformasi digital yang tidak hanya bersifat teknologis, tetapi juga strategis dan struktural. Integrasi data memperkuat posisi nagari sebagai produsen data yang kredibel, serta memperluas jangkauan pemanfaatan data untuk pembangunan lintas sektor. Dengan sistem yang terhubung, Sumatera Barat mampu membangun ekosistem data yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah nagari, kabupaten, dan provinsi dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Dokumentasi API dapat dilihat pada https://drive.google.com/drive/folders/1f-yw_2EutzvUNubneVSGq2UFE3iGqnCr?usp=sharing

5. Pendampingan peningkatan kapasitas SDM berupa Bimbingan Teknis untuk 8 (delapan) Nagari di Kabupaten Solok

Langkah kelima dalam pelaksanaan proyek perubahan MANDALA DATA adalah melaksanakan kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) nagari melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) yang difokuskan pada 16 (enam belas) nagari percontohan di Kabupaten Solok :

Tabel 3.2
Daftar Sub Domain

NO	Nama Nagari	Alamat Website
1	Nagari Lolo Surian	https://lolo.solokkab.go.id/
2	Nagari Talang Babungo	https://talangbabungo.solokkab.go.id/
3	Nagari Sungai Nanam	https://sungainanam.solokkab.go.id/
4	Nagari Batang Barus	https://batangbarus.solokkab.go.id/
5	Nagari Air Batumbuak	https://aiebatumbuak.solokkab.go.id/
6	Nagari Koto Gadang Guguk	https://kotogadangguguk-slk.desa.id/
7	Nagari Sariak Alahan Tigo	https://sariakalahantigo.solokkab.go.id/
8	Nagari Sungai Abu	https://sungaiabu.solokkab.go.id/
9	Nagari Rangkiang Luluih	https://rangkiangluluih.solokkab.go.id/
10	Nagari Batu Bajanjang Tigo Lurah	https://batubajanjangtigolurah.solokkab.go.id/
11	Nagari Simanau	https://simanau.solokkab.go.id/
12	Nagari Tanjung Balik Sumiso	https://tanjuangbaliksimiso.solokkab.go.id/
13	Nagari Garabak Data	https://garabakdata.solokkab.go.id/
14	Nagari Salimpat	https://salimpat.solokkab.go.id/
15	Nagari Aie Dingin	https://aiedingin.solokkab.go.id/
16	Nagari Kinari	https://kinari.solokkab.go.id/

Kegiatan Bimtek dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :

a. Sosialisasi

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan dengan Materi terkait Transformasi Digital, yang diikuti oleh Perangkat Nagari, Pelaku UMKM dan Penyuluh Pertanian, Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya implementasi digitalisasi untuk terwujudnya Transformasi Digital di Nagari. Dokumentasi dapat dilihat di

<https://drive.google.com/drive/folders/1N2WfRVpiED4IAVLNBFcRuV7IKP1ITN1?usp=sharing>

b. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Nagari

Bertujuan untuk memberikan literasi kepada peserta mengenai pengelolaan Sistem Informasi Nagari yang telah diinstal oleh Dinas Kominfotik Prov. Sumatera Barat ke masing – masing sub domain Nagari. Pada kegiatan ini narasumber dari Tim Efektif Mandala Data.

Materi pelatihan mencakup pengenalan sistem informasi nagari berbasis OpenSID, input data, mekanisme pembaruan data. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka dan interaktif, dengan metode simulasi langsung pada sistem yang telah direplikasi, sehingga peserta dapat memahami alur kerja secara praktis dan kontekstual. Dokumentasi dapat dilihat di <https://drive.google.com/drive/folders/113kyISONkuvqTnRa4HaYJZYVUeNjinBI?usp=sharing>

c. Workshop

Diikuti oleh 17 (tujuh belas) nagari, dengan tema Optimalisasi Platform Digital Untuk Penguatan Ekonomi Digital Dan Daya Saing Produk Lokal. Sistem Informasi yang dikembangkan, selain untuk mengelola data nagari juga terdapat menu “Lapak Nagari”. Menu ini bertujuan untuk pemasaran produk lokal Nagari. Dimana Nagari dapat memajang potensi lokas pada portal mereka. Untuk ini maka diadakan workshop yang memberikan ilmu kepada peserta tentang teknik pengambilan dan pengelolaan gambar menggunakan serta teknik pemasaran produk secara digital. Dokumentasi dapat dilihat di https://drive.google.com/drive/folders/1LF8uOqyrMNRHvaHptrXjwh0EzhEna_V2?usp=sharing

Analisis terhadap pelaksanaan Bimtek mengungkapkan bahwa sebelumnya belum terdapat program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan bagi perangkat nagari dalam pengelolaan data digital. Akibatnya, banyak nagari mengalami stagnasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan data yang tersedia tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan pembangunan. Dengan adanya Bimtek ini, terjadi transformasi kapasitas SDM yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membentuk pola pikir baru yang

adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Langkah pendampingan dan pelatihan ini merupakan elemen kunci dalam keberhasilan proyek perubahan MANDALA DATA. Tanpa SDM yang kompeten, sistem informasi yang dibangun tidak akan berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu, Bimtek menjadi investasi strategis dalam membangun ekosistem digital nagari yang berdaya, mandiri, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang partisipatif, kontekstual, dan berbasis kebutuhan, kegiatan ini memperkuat fondasi transformasi digital Sumatera Barat dari akar pemerintahan terdepan, yaitu nagari.

b. Kepemimpinan Strategis

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan proyek perubahan Mandala Data merupakan cerminan nyata dari penerapan kepemimpinan strategis di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari keluaran kebijakan dan integrasi yang dihasilkan, tetapi juga dari kemampuan pimpinan dalam menggerakkan, memberdayakan, dan menyinergikan seluruh sumber daya manusia yang terlibat. Langkah awal pelaksanaan dimulai dengan pembentukan Tim Efektif Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Nomor :20/SK/DISKOMINFOTIK-2025 tanggal 1 September 2025. Tim ini menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan seluruh tahapan kegiatan proyek perubahan, sekaligus wadah pembelajaran bersama bagi aparatur dalam membangun budaya kerja kolaboratif dan adaptif terhadap dinamika perubahan.

Pemberdayaan SDM dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan terencana yang diawali dengan rapat perdana Tim Efektif pada tanggal 4 September 2025, sebagai forum penyamaan persepsi mengenai arah kebijakan, tujuan, serta capaian yang ingin diraih dari proyek perubahan ini. Dalam forum tersebut, pimpinan mendorong keterlibatan aktif setiap anggota untuk memahami konteks strategis proyek, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai kompetensi masing-masing. Pendekatan yang digunakan bersifat collaborative leadership, di mana

pimpinan berperan sebagai fasilitator, pengarah, sekaligus pendorong inovasi agar setiap anggota dapat berkontribusi optimal. Sejak tahap awal, tim telah diarahkan untuk bekerja lintas bidang dalam mendukung integrasi data, pembuatan surat Komitmen Bersama Integrasi Data, serta pelaksanaan bimbingan teknis.

Kepemimpinan strategis dalam proyek ini tercermin dari kemampuan pimpinan dalam mengintegrasikan visi kelembagaan dengan tindakan operasional di lapangan. Setiap keputusan strategis diambil secara partisipatif dan berbasis data, memastikan kesesuaian antara arah kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Dalam menghadapi dinamika dan kendala teknis, seperti penyesuaian jadwal antaragenda dan penyelarasan substansi dokumen hukum, pimpinan mengambil peran aktif sebagai pengendali situasi sekaligus katalis yang menjaga ritme kerja tim tetap stabil. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu dan berorientasi hasil. Seluruh proses pengambilan keputusan berfokus pada prinsip transparansi, efisiensi, dan keberlanjutan, dengan tetap menjaga koordinasi yang solid antaranggota tim.

Selama pelaksanaan proyek, pendekatan coaching dan mentoring diterapkan untuk memperkuat kapasitas individu dalam tim efektif. Pimpinan secara konsisten memberikan ruang bagi anggota untuk berpendapat, mengemukakan gagasan, dan terlibat langsung dalam penyusunan produk-produk strategis proyek. Diskusi dilakukan secara simultan, baik dalam bentuk pertemuan formal maupun informal, guna mempercepat proses identifikasi permasalahan dan pencarian solusi yang inovatif. Pola kepemimpinan ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif, sekaligus menciptakan iklim kerja yang dinamis dan kolaboratif. Hasilnya, tim efektif berkembang menjadi tim pembelajar (learning team) yang adaptif, reflektif, dan berorientasi pada kinerja.

Pada tahap akhir implementasi, pemberdayaan SDM dan penerapan kepemimpinan strategis menghasilkan capaian nyata yang selaras dengan seluruh rencana perubahan. Tim efektif berhasil menyelesaikan dokumen inventarisasi kebutuhan data untuk 8 Nagari di Kabupaten Solok, membuat dokumen kesepakatan bersama terkait integrasi data antara Dinas Kominfo dan DPMD Kabupaten Solok, Melakukan replikasi aplikasi open Sistem Informasi Desa (Open SID) menjadi Sistem Informasi Nagari untuk 17 (tujuh belas) Nagari,

Melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Nagari dengan Portal Data Provinsi, Bimbingan Teknis untuk 17 (tujuh belas) Nagari di Kabupaten Solok.

Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan efektivitas kepemimpinan dalam mengarahkan tim menuju hasil yang terukur, tetapi juga membuktikan bahwa budaya kolaboratif, keterbukaan komunikasi, dan kepemimpinan berbasis pemberdayaan merupakan kunci utama keberhasilan transformasi kelembagaan. Dengan demikian, proyek perubahan ini tidak hanya melahirkan inovasi programatik, tetapi juga membangun fondasi kepemimpinan transformasional di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan Misi ke 8 Sumatera Barat yaitu Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif.

2. Optimalisasi dan Alokasi Anggaran

Pelaksanaan proyek perubahan Manadala Data : Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045 dilaksanakan dengan pendekatan optimalisasi anggaran yang telah tersedia dalam program kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, tanpa penambahan alokasi baru di luar rencana kerja perangkat daerah. Kegiatan proyek difokuskan pada jangka pendek, yaitu mendukung pelaksanaan rapat koordinasi, penyusunan dokumen, serta sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop ke Nagari di Kabupaten Solok. Strategi ini menegaskan kemampuan organisasi dalam mengelola kegiatan perubahan dengan sumber daya terbatas, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan di tingkat operasional.

Pendanaan kegiatan proyek dioptimalkan melalui Sub Kegiatan Diseminasi Informasi, dukungan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelaksanaan kegiatan ke Kabupaten Solok seperti belanja makan dan minum kegiatan, honor narasumber dan uang transportasi untuk peserta yang digunakan dalam kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Workshop.

Secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran proyek perubahan ini diarahkan sepenuhnya untuk kegiatan operasional dan substantif jangka pendek, seperti koordinasi tim dan sosialisasi lapangan. Penggunaan anggaran internal dan

dukungan lintas perangkat daerah telah mampu menjamin terlaksananya seluruh agenda kegiatan sesuai jadwal dan sasaran. Strategi ini menjadi contoh nyata penerapan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi antar instansi, serta menggambarkan tata kelola pembiayaan yang adaptif terhadap perubahan dan berorientasi pada hasil nyata.

Pada sisi pengembangan Sistem Informasi Nagari menggunakan Platform OpenSID juga tidak memerlukan anggaran, dikarenakan OpenSID bersifat *open source* tidak memerlukan biaya untuk pembayaran lisensi. Selain itu, pengembangan Sistem ini dikerjakan secara mandiri oleh Pranata Komputer di Bidang Aplikasi Informatika. Sehingga biaya pemeliharaan dan pengembangan Sistem tidak diperlukan.

3. Pemanfaatan Infrastruktur

Pemanfaatan sarana dan prasarana kerja menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini. Di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dimaksimalkan untuk mempercepat koordinasi, memudahkan akses informasi, serta memastikan proses kerja tetap berjalan efektif. Pendekatan digital ini mencerminkan pola kerja birokrasi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kegiatan koordinasi dan pembahasan teknis, tim efektif mengandalkan Zoom Meeting sebagai media utama untuk melaksanakan bimbingan teknis untuk materi tambahan pengelolaan Sistem Informasi Nagari, Pemanfaatan WhatsApp Group (WAG) oleh Tim sebagai sarana komunikasi cepat yang bersifat dinamis dan fleksibel. Melalui grup ini, berbagai informasi penting seperti agenda rapat, hasil pembahasan, serta dokumen pendukung dapat dibagikan secara real time, sehingga setiap anggota tim dapat mengikuti perkembangan kegiatan dengan cepat dan terkoordinasi.

Di sisi lain, tim juga memanfaatkan akses informasi digital melalui internet untuk pengembangan dan replikasi OpenSID menjadi Sistem Informasi Nagari. Pengembangan ini dilakukan secara online oleh Pranata Komputer Bidang

Aplikasi Informatika. Maupun pada saat Bimbingan Teknis ke Nagari di Kabupaten Solok, peserta diwajibkan menggunakan laptop yang terhubung ke Internet.

- Untuk mendukung administrasi dan pelaporan, penggunaan perangkat komputer, penyimpanan data digital serta aplikasi pengolah dokumen juga dioptimalkan. Seluruh notulensi rapat, hasil pembahasan, dan dokumen kegiatan disusun serta diarsipkan secara elektronik agar mudah diakses dan dipantau perkembangannya. Cara kerja ini memperkuat akuntabilitas sekaligus mendukung efisiensi proses pelaporan kepada pimpinan. Dengan dukungan infrastruktur digital yang dimanfaatkan secara optimal, kegiatan proyek dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan terdokumentasi dengan baik, meskipun dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat.

c. Implementasi Strategi Marketing

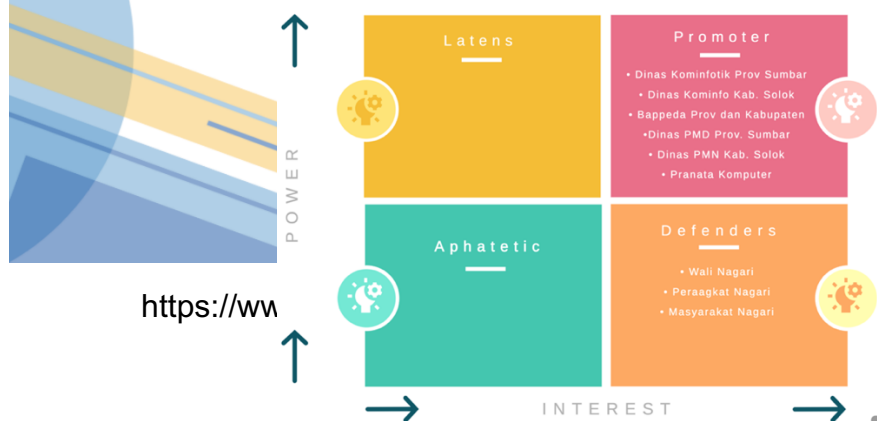
1. Peta Stakeholder

Selama pelaksanaan proyek perubahan Mandala Data terjadi dinamika dan pergeseran posisi para stakeholder yang menunjukkan peningkatan tingkat pengaruh (influence) dan kepentingan (interest) terhadap pelaksanaan program

Gambar. 3.1. Peta Stakeholder Sebelum Pelaksanaan



Gambar. 3.2. Peta Stakeholder Sesudah Pelaksanaan



<https://ww>

Pergeseran ini menggambarkan keberhasilan strategi komunikasi dan pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola kemitraan lintas sektor, baik antar instansi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun dunia usaha.

Pada kondisi sebelum proyek perubahan dimulai, kelompok Promotor masih terbatas pada lingkup Dinas yang berperan sebagai wali data dan pengelola IT seperti Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Bappeda Provinsi dan Kabupaten Solok. Sedangkan Dinas PMD Provinsi dan Dinas PMN Kabupaten Solok serta Pranata Komputer masih berada pada posisi Latent, yaitu pihak yang memiliki potensi dukungan tetapi belum menunjukkan keterlibatan aktif. Adapun masyarakat nagari yang belum memahami pentingnya integrasi data masih berada pada posisi Apathetics, yaitu kelompok dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah terhadap isu integrasi.

Setelah implementasi proyek perubahan, terjadi pergeseran signifikan dalam peta stakeholder. Dinas PMD Provinsi dan Dinas PMN Kabupaten Solok serta Pranata Komputer berhasil bergerak dari posisi Latent menjadi bagian dari Promotor, menandakan peningkatan kepedulian dan partisipasi aktif dalam mendukung program Mandala Data. Pergeseran ini dicapai melalui strategi komunikasi intensif, pelibatan langsung dalam kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis serta pembentukan kesepakatan bersama. Masyarakat Nagari yang sebelumnya pasif juga mulai berperan sebagai Defender, berpartisipasi dalam kegiatan transformasi digital dan menjadi agen perubahan di wilayahnya masing-masing.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun komunikasi dua arah dan memperkuat jejaring kerja lintas sektor memberikan hasil yang nyata. Stakeholder yang awalnya berperan pasif kini menjadi bagian penting dalam mendorong keberlanjutan program. Pergeseran ini juga memperlihatkan bahwa strategi pemasaran sosial (social marketing strategy) yang diterapkan berjalan efektif bukan dalam konteks komersial, tetapi sebagai sarana membangun kesadaran, komitmen, dan kolaborasi. Keberhasilan mengubah posisi

stakeholder menjadi promotor aktif membuktikan bahwa pengelolaan komunikasi strategis dan kemitraan merupakan kunci utama dalam memperluas dampak proyek perubahan terwujudnya integrasi Data Nagari.

2. Strategi Marketing

Pendekatan 4P1C diterapkan sebagai strategi komunikasi dan pemasaran sosial dalam memperluas jangkauan, memperkuat dukungan, serta membangun kesadaran publik terhadap pentingnya integrasi data menuju Transformasi Digital di Kabupaten Solok. Penerapan strategi ini dilakukan secara terencana dan adaptif dengan menyesuaikan konteks pemerintahan, di mana sasaran utamanya bukan konsumen dalam arti ekonomi, tetapi stakeholder dan masyarakat nagari sebagai penerima manfaat serta mitra perubahan.

a) Product (Produk)

Produk utama dari proyek perubahan ini adalah Mandala Data yang dikembangkan melalui Mantapkan Nagari Data Langsung Terintegrasi. Mandala Data menawarkan konsep Kedaulatan Data di Nagari. Dimana Integrasi Data berlangsung tanpa harus memindahkan data Nagari ke Provinsi. Pemanfaatan sistem penghubung (API) memungkinkan hal ini terjadi. Dimana Nagarin tetap pada posisi pemilik data, dan Provinsi mengambil data secara agregat melalui sistem penghubung.

b) Price (Harga)

Dalam konteks proyek perubahan ini, “harga” tidak diartikan sebagai biaya finansial, tetapi sebagai tingkat komitmen dan partisipasi yang diharapkan dari para stakeholder. Dinas Kominfo dan Dinas PMN Kabupaten Solok serta Perangkat Nagari diharapkan “membayar” melalui kontribusi nyata seperti menyediakan waktu, sumber daya, dan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan Integrasi Data. Melalui pendekatan partisipatif ini, semua pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan akan pentingnya integrasi data untuk mewujudkan transformasi digital di Nagari.

c) Place (Tempat)

Lokasi penerapan strategi berfokus pada 17 Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. Dinas Kominfotik Provinsi berperan sebagai fasilitator utama yang menjembatani kerja sama antar instansi, termasuk

Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Dinas PMN Kabupaten Solok, Perangkat Nagari, kegiatan juga dilakukan di ruang-ruang kolaborasi seperti ruang rapat di Kantor Bupati Kabupaten Solok, dan forum daring yang memudahkan komunikasi antar stakeholder. Pemanfaatan Zoom Meeting dan WhatsApp Group turut memperluas jangkauan pelaksanaan dan efisiensi waktu koordinasi lintas wilayah.

d) Promotion (Promosi)

Strategi promosi dilakukan melalui publikasi media daring dan media sosial, baik melalui kanal resmi Dinas Komimfotik maupun melalui jaringan media massa online serta media luar ruangan (videotron).

Tabel 3.3
Daftar Publikasi pada Media Online

No	Media Online	Link
1	www.sumbarprov.go.id	https://sumbarprov.go.id/home/news/23760-nagari-sebagai-sumber-data-menenun-kedaulatan-dan-integrasi-digital-dari-solok-untuk-indonesia
2	www.sumbarprov.go.id	https://sumbarprov.go.id/home/news/23759-data-sebagai-fondasi-pemerintahan-modern-studi-kasus-tata-kelola-data-di-pemerintah-provinsi-sumatera-bar
3	www.sumbarprov.go.id	https://sumbarprov.go.id/home/news/23761-diskominfotik-sumbar-perkuat-digitalisasi-di-kabupaten-solok-nagari-039cerdas039-bukan-lagi-mimpi
4	www.sumbarprov.go.id	https://sumbarprov.go.id/home/news/23758-branding-produk-unggulan-nagari-pengusaha-umkm-se-kabupaten-solok-ikuti-workshop-optimalisasi-platform-digital

5	www.sumbarprov.go.id	https://sumbarprov.go.id/home/news/23751-dorong-layanan-publik-yang-cepat-dan-transparan-diskominfo-sumbar-gelar-diseminasi-sistem-informasi-nagari
6	IG kominfosumbar	https://www.instagram.com/reel/DQOWtavkuo/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=
7	IG kominfosumbar	https://www.instagram.com/reel/DQO_rI2kula/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==
8	Videotron Pemprov	https://h7.cl/videotron
9	Youtube Pemprov	https://www.youtube.com/watch?v=5GIPt7uPgv8

e). Customer (Pelanggan)

Dalam konteks sosial, “customer” merujuk pada pihak penerima manfaat dan pelaku perubahan, yaitu Perangkat Nagari, UMKM, Diskominfo Kabupaten Solok, Dinas PMN Kabupaten Solok. Strategi komunikasi diarahkan agar setiap pihak memahami manfaat langsung dari partisipasi mereka dalam program. Nagari memperoleh Sistem Informasi Nagari yang telah dikembangkan oleh Diskominfo Pros. Sumbar. Provinsi mendapatkan integrasi data dari Nagari. Dinas Kominfo Kabupaten Solok mendapatkan manfaat data untuk pembangunan yang terencana.

d. Keberlanjutan proyek perubahan

1) Keberlanjutan Proyek Perubahan

Keberlanjutan proyek perubahan Mandala Data memperoleh dukungan kuat dari berbagai stakeholder kunci, baik dari unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat. Dukungan ini menjadi fondasi penting untuk menjamin kesinambungan program setelah tahap implementasi awal berakhir, serta memastikan bahwa semangat transformasi digital tetap berlanjut di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dukungan dari Gubernur Sumatera Barat menjadi penopang utama keberlanjutan proyek dan ditindaklanjuti dengan Kesepakatan bersama antara Diskominfo Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Kabupaten Solok dan Dinas PMN Kabupaten Solok untuk menegaskan komitmen terwujudnya integrasi data antara Provinsi dan Nagari.

Dukungan juga hadir dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai wujud betapa pentingnya integrasi data sebagai data untuk pembangunan di Sumatera Barat.

Dukungan dari para stakeholder ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan proyek tidak hanya bergantung pada satu lembaga, tetapi telah menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh unsur: pemerintah, masyarakat, perangkat nagari. Kolaborasi ini memastikan bahwa semangat Mandala Data akan terus tumbuh sebagai bagian dari Transformasi Digital di Sumatera Barat.

Secara substantif, proyek MANDALA DATA memiliki keterkaitan yang sangat erat dan strategis dengan kerangka pembangunan nasional, yaitu Asta Cita (Visi Indonesia Emas 2045) yaitu mendukung Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Akses Teknologidan (Asta Cita 4) dan Mendukung Pembangunan dari Desa/Bawah (Nagari) - Asta Cita 6, serta Sustainable Development Goals (SDGs) ke 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals)

2) Manfaat Proyek Perubahan

Dalam konteks Reformasi Birokrasi Berdampak, proyek perubahan ini menjadi contoh nyata penerapan birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil (outcome oriented). Melalui kolaborasi antara Dinas Diskominfo Prov. Sumbar, Dinas PMD Kab. Solok, Dinas PMN Kabupaten Solok, sekolah, lahirlah metode integrasi data yaitu Mandala Data, dimana Kedaulatan Nagati tetap ditangan nagari.

Proyek ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Goal 9 tentang Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Selanjutnya, manfaat proyek ini juga sejalan dengan Tema Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Provinsi Sumatera Barat, yaitu “Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas.” Proyek ini menunjukkan bagaimana aparatur pemerintah mampu menjadi penggerak perubahan sosial dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari siswa, guru, orang tua, hingga komunitas sekitar sekolah. Kepemimpinan kolaboratif yang dibangun selama implementasi proyek menunjukkan bahwa ASN

tidak hanya bekerja sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai change leader yang mampu menginspirasi perubahan perilaku dan memperluas partisipasi publik dalam pemanfaatan data.

Secara keseluruhan, manfaat proyek Mandala Data mencakup tiga dimensi utama: pembangunan manusia (SDM), penguatan tata kelola birokrasi, dan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara Asta Cita, RB Berdampak, SDGs, dan Tema PKN menjadikan proyek ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan gerakan strategis yang membawa perubahan nyata menuju Sumatera Barat yang hijau, bersih, dan berdaya saing berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Kominfo Kabupaten Solok, dari 74 website Nagari, 41 website tidak aktif, biaya pembanguana Sistem Informasi Nagari adalah sekitar 5.000.000,-, maka 41 Nagari apabila menggunakan platform yang dikembangkan oleh Diskominfotik Sumbar secara gratis, maka bisa menghemat biaya pembangunan Sistem Informasi Nagari sebesar $41 \text{ Nagari} \times 5.000.000 = 205.000.000$ dan menghemat biaya pemeliharaan sebesar $74 \text{ Nagari} \times 1.000.000 = 74.000.000$, maka akan terjadi penghematan bisa pengembangan sistem sebesar 279.000.000 setiap tahun.

Nilai tersebut mencerminkan pemanfaatan digital dapat menekan biaya suatu kegiatan. Hal ini menunjukkan efektivitas implementasi proyek perubahan yang tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menciptakan kemandirian digital. Kegiatan ini mendorong tercapainya target SDGs Tujuan ke-9, sekaligus memperkuat prinsip Reformasi Birokrasi Berdampak, di mana pemerintah berperan sebagai katalis perubahan dan fasilitator sinergi multipihak.

Dengan demikian, proyek Mandala Data tidak hanya menghasilkan konsep Integrasi data yang terpadu antara provinsi dan kabupaten, tetapi juga menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

3) Key Success Factors

Keberhasilan implementasi proyek perubahan Mandala Data sangat ditentukan oleh beberapa faktor strategis yang saling menguatkan. Pertama, komitmen dan

kepemimpinan transformasional dari pimpinan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menjadi pendorong utama yang memastikan setiap tahap berjalan efektif. Kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi mampu menggerakkan ASN lintas bidang untuk bekerja secara sinergis di bawah koordinasi Tim Efektif, yang dibentuk melalui SK Kepala Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 20/SK/Diskominfotik-2025. Tim ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai motor inovasi birokrasi yang menjaga kesinambungan program melalui pelibatan aktif stakeholder dan perangkat nagari

Faktor kedua adalah kolaborasi multipihak yang kuat dan berbasis kemitraan win-win solution. Dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam hal ini Diskominfo Kabupaten Solok dan Dinas PMN Kabupaten Solok, yang dituangkan dalam dokumen Kesepakatan Bersama Integrasi Data, sehingga Pemkab Solok siap memfasilitasi terwujudnya Mandala Data.

Dengan kesepakatan Bersama ini, Dinas Kominfo Kabupaten Solok sebagai wali data, mendukung penuh Mandala Data dengan menyiapkan server sebagai hosting Sistem Informasi Nagari untuk 74 Nagari dan memberikan subdomain untuk semua Nagari sekaligus menjamin keamanan informasi untuk semua Nagari.

Sedangkan Dinas PMN Kabupaten Solok, mendukung penuh semua kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis dan workshop dengan memfasilitasi sarana dan prasarana serta menyediakan peserta dari 17 Nagari.

Faktor ketiga adalah penguatan komunikasi dan strategi marketing publik yang efektif. Melalui kampanye digital dengan tagar #MandalaData, pesan proyek tersebar luas di berbagai kanal media. Pendekatan branding yang kuat menjadikan proyek ini dikenal sebagai gerakan Kedaulatan Data nagari, bukan sekadar program teknis pemerintah.

Selanjutnya, keberhasilan juga didukung oleh infrastruktur pendukung dan teknologi komunikasi yang efisien, seperti penggunaan Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan platform berbasis internet untuk mempercepat koordinasi, diseminasi informasi, serta dokumentasi capaian. Hal ini memperkuat efektivitas birokrasi digital dan efisiensi waktu dalam setiap tahap implementasi.

Akhirnya, faktor kunci lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan platform OpenSID berbasis open source yang mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan Nagari dan tanpa ada biaya lisensi. Sehingga Nagari tidak perlu mengeluarkan biaya. OpenSID adalah sistem informasi desa berbasis open source yang dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola data dan layanan publik secara digital, transparan, dan akuntabel. Sistem ini menyediakan berbagai fitur komprehensif untuk mendukung tata kelola Nagari yang modern dan efisien.

Fitur Unggulan pada OpenSID adalah :

1. Modul kependudukan untuk pencatatan data individu, kartu keluarga, serta peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.
2. Modul Statistik, untuk tampilan data statistik kependudukan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram, mencakup kategori seperti umur, pendidikan, pekerjaan, dan agama. Data ini dapat diperbarui secara dinamis berdasarkan data kependudukan.
3. Modul Persuratan, untuk pembuatan lebih dari 30 jenis surat administrasi Nagari, seperti surat keterangan domisili, izin usaha, dan surat kematian. OpenSID menyediakan template surat yang dapat dicetak langsung, mempercepat proses pelayanan publik
4. Lapak Nagari, sebagai media promosi, fitur lapak digunakan untuk memasarkan produk unggulan desa, seperti hasil pertanian atau kerajinan tangan, kepada masyarakat luas

Untuk implementasi Mandala Data – Mantapkan Nagari Data Langsung Terintegrasi, Modul API pada OpenSID berfungsi sebagai antarmuka yang memungkinkan integrasi dan pertukaran data antara OpenSID dengan aplikasi lain secara otomatis dan terstandarisasi. Dengan modul API ini, data Nagari yang dikelola dalam OpenSID bisa diakses atau dikirim secara programatik melalui layanan web, baik untuk keperluan internal desa maupun integrasi dengan sistem yang lebih besar seperti portal data nasional.

Modul API OpenSID mendukung pengambilan dan pengiriman data terkait pendataan penduduk, administrasi surat, serta informasi lain yang dikelola dalam sistem. Hal ini mempermudah sinkronisasi data desa dengan data nasional dan memungkinkan pemanfaatan data secara lebih luas dan real-time.

Pendekatan integrasi ini mendukung transparansi data, pengelolaan yang efektif, serta akses data yang lebih mudah bagi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Dengan demikian, OpenSID bukan hanya berfungsi sebagai Sistem Informasi Nagari lokal, tetapi juga sebagai sumber data yang terintegrasi ke dalam kerangka data nasional yang lebih besar dan komprehensif.

e. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Pelaksanaan pemberdayaan organisasi pembelajar dalam proyek perubahan Mandala Data berfokus pada pengembangan kompetensi tim dan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan birokrasi adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil. Strategi ini sejalan dengan semangat Asta Cita, Reformasi Birokrasi Berdampak (RB), dan SDGs terutama pada poin 4 (Sains, Teknologi), 6 (Membangun dari Desa), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

1) Pengembangan Kompetensi Tim Efektif

Pemberdayaan tim dimulai dengan pembentukan Tim Efektif melalui SK Kepala Komunikasi, Informatika dan Statistik Nomor 20/SK/Diskominfotik-2025., Tim ini terdiri dari pejabat struktural, Pranata Komputer, Pranata Humas dan Tim IT.

Pelatihan dan pembinaan tim dilakukan dengan pendekatan collaborative learning di mana setiap anggota memperoleh kesempatan belajar aktif melalui:

- Rapat koordinasi dan diskusi rutin (September – Oktober 2025) untuk menyamakan visi dan memahami peran dalam implementasi proyek.
- Coaching dan mentoring langsung dari pimpinan, yang menumbuhkan kapasitas kepemimpinan adaptif, kemampuan analisis kebijakan, dan keterampilan manajemen perubahan.
- Penggunaan platform digital seperti Zoom Meeting, WhatsApp Group, dan Google Drive sebagai sarana pembelajaran kolaboratif yang efisien dan berbasis pengetahuan (knowledge-based collaboration).

Tim Efektif berkembang menjadi learning team yang tidak hanya melaksanakan kegiatan administratif, tetapi juga menghasilkan inovasi kelembagaan seperti penyusunan Dokumen Kesepakatan Integrasi Data, Replikasi Platform OpenSID untuk Sistem Informasi Nagari di Kabupaten Solok.

2) Pengembangan Kompetensi Stakeholder

Peningkatan kapasitas juga dilakukan kepada stakeholder eksternal yang berperan dalam keberhasilan proyek:

- Perangkat Nagari di Kabupaten Solok, diberikan Sosialisasi terkait Transformasi Digital, pendampingan pengelolaan Sistem Informasi Nagari dan Workshop Produk Digital.
- UMKM Nagari di Kabupaten Solok, diberikan Sosialisasi terkait Transformasi Digital, pendampingan pengelolaan Sistem Informasi Nagari dan Workshop Produk Digital.

3) Kolaborasi Multipihak sebagai Organisasi Pembelajar

Seluruh pelibatan stakeholder diarahkan agar setiap pihak menjadi bagian dari learning organization yakni organisasi yang terus belajar, beradaptasi, dan berbagi pengetahuan.

- Pemerintah daerah menjadi fasilitator dan katalis perubahan.
- Perangkat Nagari dan UMKM menjadi laboratorium peningkatan kompetensi Teknologi Informasi.
- Media massa dan komunitas berperan dalam penyebaran nilai dan praktik baik (best practices) melalui publikasi digital Mandala Data
- Pendekatan ini menciptakan siklus belajar bersama (*shared learning cycle*): hasil dari satu kegiatan dijadikan bahan refleksi untuk perbaikan kegiatan berikutnya, memperkuat kompetensi kolektif lintas sektor.

4) Implementasi Pengembangan Kompetensi Diri

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: Lizda Handayani	Nama Mentor	: Vasko Ruseimy		
NIP	: 197501212002122000	NIP:	: 0		
Jabatan	: Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Jabatan	: Wakil Gubernur		
Instansi	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provins	Instansi	: 0		
Program	: Diklat PKN II Angkatan XX				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,08	8,20	8,10	8,13	Baik
Mentor	9,00	9,00	9,00	9,00	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	8,73	8,76	8,73	8,74	Baik
Kualifikasi Per Sub Komponen	Baik	Baik	Baik	Baik	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		8,74		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup				
3-4.99	Kurang				
1-2.99	Sangat Kurang				
			Kualifikasi: Baik		

Menjalankan sebuah proyek perubahan tidak hanya menuntut kemampuan manajerial dan teknis, tetapi juga kesiapan pribadi untuk terus belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri. Selama proses implementasi Mandala Data – Mantapkan Nagari Data Langsung Terintegrasi, pelaksana proyek menyadari bahwa keberhasilan perubahan tidak lepas dari kualitas kepemimpinan yang dibangun melalui refleksi diri yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi pribadi menjadi bagian penting dalam perjalanan proyek ini bukan semata untuk memenuhi indikator kinerja, tetapi untuk menumbuhkan kepekaan, kedewasaan berpikir, dan kemampuan menggerakkan orang lain secara lebih efektif.

Pengembangan diri dilaksanakan berdasarkan pemetaan sikap perilaku yang mencakup tiga subkomponen utama, yaitu Integritas, Kerja Sama, dan Kemampuan Mengelola Perubahan. Hasil pemetaan yang menunjukkan rata-rata nilai 8,74 dengan kategori “Baik” mencerminkan keseimbangan antara kemampuan pribadi dan profesional dalam memimpin tim serta mengelola dinamika proyek.

Pada aspek Integritas, pelaksana proyek menempatkan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi sebagai landasan utama setiap keputusan. Transparansi dalam komunikasi, komitmen terhadap hasil, serta keteguhan menjaga kepercayaan stakeholder menjadi praktik nyata dari nilai integritas yang diinternalisasikan selama proses perubahan.

Pada aspek Kerja Sama, pelaksana berupaya membangun budaya kolaborasi yang sehat dengan mengedepankan empati, keterbukaan, dan kesediaan untuk mendengarkan. Kegiatan rapat koordinasi, diskusi lintas bidang, hingga kemitraan dengan dunia usaha dijadikan ruang belajar bersama untuk memperkuat solidaritas dan kesamaan visi di antara semua pihak yang terlibat.

Sementara itu, pada aspek Kemampuan Mengelola Perubahan, pelaksana mengasah kecakapan adaptif melalui pendekatan reflektif dan tangkas dalam pengambilan keputusan. Setiap kendala dijadikan sarana pembelajaran, bukan hambatan. Dengan berbekal semangat inovatif, pelaksana mampu mengubah tantangan menjadi peluang, serta menjaga motivasi tim agar tetap fokus pada hasil akhir yang berdampak.

Melalui proses pembelajaran tersebut, pelaksana proyek berkembang menjadi pemimpin pembelajar (*learning leader*) yang tidak hanya memimpin melalui instruksi, tetapi juga melalui keteladanan dan inspirasi. Kompetensi yang terbangun dari pengalaman langsung di lapangan menjadi modal penting untuk memperkuat efektivitas birokrasi pembelajar dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

a. Keterkaitan Mata Pelatihan Pilihan

Pemanfaatan mata pelatihan pilihan dalam pelaksanaan proyek perubahan memberikan penguatan konseptual dan praktis bagi peserta dalam menjalankan peran sebagai *change leader*. Berdasarkan hasil pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, terdapat tiga mata pelatihan yang memiliki relevansi langsung terhadap proyek Mandala Dara, yaitu Manajemen Perubahan, Kepemimpinan Strategis, dan Manajemen Risiko.

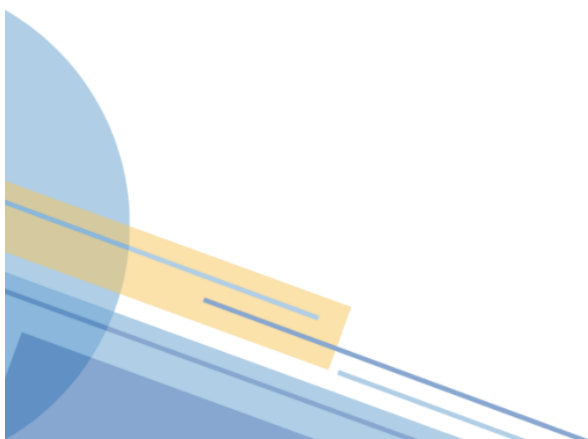
Pertama, Manajemen Perubahan berperan penting karena inti dari proyek ini adalah mengubah paradigma pentingnya satu data yang terintegrasi pendekatan reaktif menjadi partisipatif dan kolaboratif. Pemahaman atas prinsip manajemen perubahan membantu pelaksana proyek mengelola resistensi, membangun *sense of urgency*, dan menciptakan kegiatan yang terukur dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, kegiatan seperti penyusunan replikasi OpenSID untuk Sistem Informasi Nagari dapat berjalan efektif karena disertai strategi komunikasi dan adaptasi sosial yang matang

Kedua, Kepemimpinan Strategis menjadi kunci dalam membangun sinergi multipihak antara Provinsi, Kabupaten, Nagari. Mata pelatihan ini memperkuat kapasitas peserta untuk menetapkan visi bersama, mengelola jejaring stakeholder, serta mengarahkan kolaborasi lintas sektor. Hasilnya tampak nyata melalui Kesepakatan Bersama Integrasi Data. Pembelajaran kepemimpinan strategis juga memperkuat kemampuan branding dan komunikasi publik melalui kampanye #MandalaData yang menjadi identitas gerakan perubahan

Ketiga, Manajemen Risiko berperan dalam memastikan keberlanjutan proyek melalui identifikasi dan mitigasi potensi hambatan, seperti keterbatasan regulasi, fluktuasi dukungan stakeholder, maupun risiko keberlanjutan program di Nagari. Mata pelatihan ini membantu pelaksana menyusun skenario kontinjensi dan mekanisme

proses update data, integrasi data dan antisipasi keamanan informasi. Kemampuan ini menjamin bahwa setiap potensi kendala dapat dikelola tanpa mengganggu tujuan besar proyek perubahan

Secara keseluruhan, ketiga mata pelatihan pilihan ini memberikan landasan kompetensi yang memperkuat kapasitas kepemimpinan birokrasi dalam menjalankan transformasi digital di Sumatera Barat. Sinergi antara teori dan praktik menjadikan proyek Mandala Data selaras dengan arah Reformasi Birokrasi Berdampak, mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) terutama tujuan ke-4 (Sains, Teknologi), 6 (Membangun dari Desa), 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), dan 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta sejalan dengan tema besar PKN Tingkat II yaitu “Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Birokrasi dalam Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Berkualitas.”



IV. PENUTUP

▪ Kesimpulan

Pelaksanaan proyek perubahan Mandala Data telah berhasil membuktikan efektivitas dan nilai strategis dalam memperkuat integrasi data nagari melalui penggunaan OpenSID sebagai platform utama. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah provinsi, Kabupaten, dan Nagari, proyek ini telah menghasilkan kebijakan, kemitraan, dan instrumen pembelajaran yang mendukung terbentuknya integrasi data secara sistematis dan berkelanjutan.

Capaian utama proyek meliputi tertandatanganinya Kesepakatan Bersama Integrasi Data Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat dengan Dinas Kominfo Kabupaten Solok dan Dinas PMN Kabupaten Solok, terlaksananya integrasi Data Nagari dengan Portal Satu Data Provinsi Sumatera Barat serta Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Nagari.

Secara strategis, proyek ini juga telah memperlihatkan bagaimana birokrasi dapat bertransformasi menjadi organisasi pembelajar yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi hasil (outcome oriented). Melalui penerapan kepemimpinan strategis dan mekanisme pembelajaran adaptif, tim efektif mampu mengelola dinamika lintas instansi dengan efisien, memperkuat sinergi antar-stakeholder, dan memastikan seluruh target implementasi tercapai tepat waktu.

Dari sisi substansi, proyek ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian Asta Cita Nasional (khususnya butir ke-4 dan ke-6), Reformasi Birokrasi Berdampak, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-9, dan ke-16. Melalui integrasi data dan semangat kedaulatan data nagari, proyek ini tidak hanya meningkatkan kualitas data di tingkat nagari, tetapi juga meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di tingkat Nagari, mempercepat digitalisasi, dan memperbaiki kualitas layanan publik

Dengan demikian, Integrasi data yang terwujud membuka peluang guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan Nagari. Secara keseluruhan, Mandala Data menjadi fondasi penting dalam transformasi digital pemerintahan nagari yang mendukung pengambilan

keputusan berbasis data yang lebih akurat dan efektif, sejalan dengan visi Indonesia Maju 2045. Keberlanjutan dan replikasi proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak luas bagi peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan

▪ **Saran/Rekomendasi**

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Laksanakan pelatihan literasi digital secara berkelanjutan bagi perangkat nagari untuk memastikan pengelolaan data yang kompeten.
 - b. Tingkatkan pendampingan teknis dari pemerintah provinsi dan kabupaten agar proses digitalisasi berjalan optimal.
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi
 - a. Gunakan sistem open source seperti OpenSID untuk memudahkan replikasi dan mengurangi beban biaya lisensi.
 - b. Kembangkan modul API yang handal untuk mendukung integrasi data antara nagari, kabupaten, provinsi, dan portal nasional.
3. Standarisasi Data dan Integrasi Sistem
 - a. Tetapkan standar metadata dan protokol integrasi data secara nasional untuk menghindari fragmentasi dan duplikasi data.
 - b. Bangun mekanisme sinkronisasi data otomatis antar sistem demi ketersediaan data yang mutakhir dan akurat.
4. Kebijakan dan Regulasi Pendukung
 - a. Sosialisasikan dan tetapkan regulasi yang mendukung integrasi data dan transformasi digital di tingkat nagari dan daerah.
 - b. Berikan dukungan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem data desa.
5. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
 - a. Tingkatkan akses dan keterbukaan data desa melalui portal yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
 - b. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis data yang tersedia.
6. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Laksanakan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penerapan sistem informasi nagari dan integrasi data.

- b. Gunakan hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan berkelanjutan agar sistem informasi Nagari semakin optimal.

▪ **Lesson Learn**

Pelaksanaan proyek perubahan Mandala Data memberikan banyak pembelajaran berharga, baik dari sisi kepemimpinan pribadi maupun tata kelola organisasi. Proyek ini membuktikan bahwa perubahan tidak akan terjadi hanya melalui regulasi, tetapi melalui proses pembelajaran bersama, kolaborasi lintas sektor, dan keteladanan kepemimpinan yang konsisten.

1. Pentingnya Penguatan Kapasitas SDM, Penguatan literasi digital dan kapasitas pengelolaan data bagi perangkat nagari sangat krusial untuk kesuksesan digitalisasi dan integrasi data desa.
2. Manfaat Sistem Open Source, Penggunaan OpenSID sebagai platform open source terbukti efektif, fleksibel, dan mudah direplikasi di berbagai nagari tanpa membebani biaya lisensi.
3. Sinergi dan Kolaborasi, Keberhasilan proyek sangat bergantung pada kolaborasi lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, nagari, hingga masyarakat dan swasta.
4. Perubahan Budaya Kerja, Transformasi digital menuntut perubahan mindset dan budaya kerja aparat nagari yang lebih adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik.
5. Standarisasi Data dan Integrasi Sistem, Adanya standarisasi metadata dan protokol integrasi menjadi kunci mengatasi fragmentasi dan duplikasi data di tingkat nagari, kabupaten, dan provinsi.
6. Pentingnya Monitoring dan Evaluasi, Mekanisme evaluasi dan monitoring berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang konsisten dan peningkatan kualitas sistem.
7. Dukungan Kebijakan dan Regulasi, Dukungan resmi dari pemerintah daerah dan kebijakan yang jelas memperkuat keberlanjutan dan skalabilitas digitalisasi nagari.
8. Mendorong Transparansi dan Partisipasi Publik, Portal data nagari yang terbuka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan Nagari.

REFERENSI

- Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang *Desa*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang *Aparatur Sipil Negara (ASN)*
- Peraturan Presiden no 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*
- Bappenas. (2021). *Strategi Nasional Ekonomi Digital Indonesia*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2025). *RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025–2029*
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). *Indeks Literasi Digital Indonesia*.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah*.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang *Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan*.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Energi Kepemimpinan dan Integritas Kepemimpinan*.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Kepemimpinan Digital, Kepemimpinan Kewirausahaan*.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Kepemimpinan Kewirausahaan*.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Organisasi Pembelajar*
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Diagnosa Organisasi*.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Manajemen Strategis Sektor Publik*.
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Marketing Sektor Publik*
- Lembaga Administrasi Negara, 2021, *Modul Kemitraan Swasta dan Pemerintah*

Lampiran 1. Filosofi Mandala Data

● Implementasi Proyek Perubahan Strategi Pengembangan Satu Data Sumatera Barat Melalui Integrasi Data Nagari Dalam Mewujudkan Transformasi Digital Mendukung Visi Indonesia Maju 2045 “MANDALA DATA (Mantapkan Data Nagari Langsung Terintegrasi) dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Integrasi Data antara Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Kabupaten Solok dan Dinas Pemerintahan Masyarakat Nagari Kabupaten Solok dengan isi kesepakatan adalah berkomitmen untuk mendukung dan mensukseskan integrasi data Nagari untuk mewujudkan Transformasi Digital Sumatera Barat.



Makna Logo Mandala Data adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Lingkaran

Bentuk lingkaran pada logo melambangkan kesatuan, kesinambungan, dan konektivitas antar-nagari di Sumatera Barat. Lingkaran menggambarkan bahwa seluruh elemen pemerintahan nagari saling terhubung dalam satu sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Secara filosofi, bentuk ini juga mencerminkan nilai-nilai “saciok bak ayam, sadancıang bak basi” — simbol kebersamaan dan sinergi antar nagari untuk mencapai tujuan pembangunan bersama.

2. Garis Melengkung yang Terhubung

Dua garis yang saling menyilang di tengah lingkaran melambangkan aliran data dan kolaborasi digital antar sistem. Simbol ini mencerminkan proses pertukaran, sinkronisasi, dan integrasi informasi antar-nagari dan antarperangkat daerah, sehingga data dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pelayanan publik, perencanaan, dan pengambilan kebijakan. Keterhubungan ini juga mencerminkan

kerja sama lintas sektor — antara pemerintah daerah, perangkat nagari, dan masyarakat.

3. Warna

- Minangkabau memiliki dua tradisi warna basa, hitam-merah-emas dan hitam-emas-putih-merah. Hitam-merah-emas adalah bendera Basa Alam Minangkabau, Konfederasi Minangkabau, Kerajaan Pagaruyung, dan kerajaan-kerajaan pendahulu yang disebut dalam Tambo Alam Minangkabau. Warna hitam melambangkan pangulu, emas melambangkan manti, putih melambangkan malin, dan merah melambangkan dubalang.

4. Tipografi “Mandala Data”

Tulisan Mandala Data menggunakan gaya huruf modern poppins yang sederhana namun kuat. Bentuk huruf yang bersih dan tegas mencerminkan profesionalisme, transparansi, dan keterbukaan informasi publik. Kata Mandala Data sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “lingkaran kesatuan” atau “pusat harmoni,” selaras dengan visi utama program integrasi data nagari sebagai pusat informasi digital Sumatera Barat.

5. Makna Keseluruhan

Logo Mandala Data mencerminkan visi “Sumatera Barat Terhubung Secara Digital” — di mana seluruh nagari berperan aktif dalam ekosistem data yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Melalui simbol konektivitas, kesatuan, dan pertumbuhan, Mandala Data menjadi identitas dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan solusi teknologi informasi yang berpadu dengan nilai-nilai lokal dan semangat kolaborasi.

